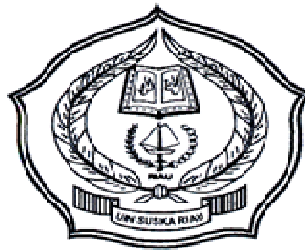


**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 27 PADA LAPORAN
KEUANGAN KOPERASI KPRI “GKR”
RAMBAH -ROKAN HULU
SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti
Ujian Oral Eomprehensive Sarjana Lengkap
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim
Riau*



Disusun Oleh :
HANIF MARTIN, A. Md
NIM. 10473026299

**JURUSAN AKUNTANSI S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2010**

ABSTRAKSI
ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 27 PADALAPORAN KEUANGAN
KOPERASI KPRI "GKR"RAMBAH-ROKAN HULU.

Oleh: Hanif Martin.

I047 3026299

Penelitian ini dilaksanakan di KPRI "GKR"Rambah yang berkedudukan di Jln. Diponegoro Simpang Tugu Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2009, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui susunan dan penyajian laporan keuangan KPRI "GKR"Rambah dan untuk mengetahui unsur-unsur laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI "GKR"Rambah Apakah sudah sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan PSAK NO. 27.

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis Deskripsi yaitu dengan menganalisis tata cara serta penyajian Iaporan Keuangan yang dilaksanakan oleh KPRI "GKR"Rambah kemudian membandingkan dengan PSAK NO. 27 yang mengatur tentang usaha perkoperasian di Indonesia. Jenis data yang digunakan oleh penulis adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya berupa pengamatan dan wawancara langsung dengan pengurus dan karyawan koperasi mengenai kegiatan usaha koperasi, penjelasan mengenai piutang, kewajiban, pendapatan dan beban. Dan data skunder yatiu · data yang sudah diolah Iebih Ianjut yang bersurnber dari Koperasi KPRI "GKR"Rambah seperti Iaporan lteuangan, struktur organisasi, aktivitas pernshaan, dan dokumen tentang sejarah singkat kaperasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa kekurangan dari laporan keuangan yaitu kaperasi tidak memisahkan antara pendapatan yang berasal dari anggota dan pendapatan yang berasal dari nan anggota KPRI "GKR "Rambah hanya menyajikan Neraea dan Perhitungan Hasil Usaha sebaliknya Koperasi itdak menyajikan Laporan Arus Kas, Laparan pramasi ekanami anggota dan kaperasi juga tidak menyajikan kebijakan akuntansi dan penjelasan pos-pos perhitungan hasil usaha dalam catatan atas Iaporan keuangannya.

Dari kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis, hendaknya koperasi membuat perkiraan penyisihan piutang tak tertagih dengan nilai yang sebenarnya, memisahkan pendapatan dari anggota dan pendapatan dari non anggota. Koperasi harus membuat unsur-unsur laporan keuangan yang meliputi laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan,sebaiknya kaperasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan rnernberikan pelatihan pendidikan perkoperasian.

Kata Kunci : PSAK NO. 27, Akuntansi perkoperasian

DAFTAR ISI

ABSTRAK.	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	6
E. Sistematika Penu1isan.....	7
BAB II : TELAAH PUSTAKA	
A. Gambaran Umum Akuntansi.....	9
B. Gambaran Umum Badan Usaha Koperasi.	11
C. Karakteristik Penyajian Laporan keuangan Koperasi	15
D. Karakteristik Penyajian Laporan Neraca Koperasi.....	20
E. Penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi.	35
F. Penyajian Laporan Arus Kas Koperasi.....	39
G. Penyajian Laporan Promosi Ekonomi anggota.....	43
H. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi.	45
I. Koperasi Dalam Islam.....	46
BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
A. Sejarah Singkat Koperasi.....	49
B. Struktur Organisasi Koperasi.....	50
C. Aktivitas Usaha opemsi.....	55
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penilaian dan Penyajian Laporan Neraca.....	56
B. Penilaian dan Penyajian Laporan Perhitungan Usaha.....	64
C. Penilaian dan Penyajian Laporan Arus Kas.....	70
D. Penilaian dan Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota.....	72
E. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan.....	76
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pada hakikatnya koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan. Sebab koperasi merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup orang banyak pada umumnya dan anggota khususnya.

Laporan keuangan sebagai salah satu sistem informasi sangat dibutuhkan semua badan usaha dalam kegiatan operasionalnya untuk dapat memberikan informasi keuangan dan pertanggungjawaban sehubungan dengan kegiatan usahaselama periode tertentu. Standar penyusunan laporan keuangan koperasi dikenal dengan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) NO. 27 yang mengatur tentang seluruh aturan badan usaha koperasi serta konsep dasar susunan dan penyajian laporan keuangannya.

Akuntansi untuk koperasi memiliki beberapa ciri-ciri khusus yang membedakan dengan badan usaha lain. Laporan laba rugi pada koperasi disebut dengan laporan perhitungan hasil usaha, transaksi yang terjadi dengan anggota dan bukan dengan anggota akun-akun tertentu seperti piutang, kewajiban dan pendapatan harus dibedakan. Adanya perkiraan-perkiraan tertentu pada koperasi yang tidak terdapat pada badan usaha lain, seperti modal yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, modal sumbangan, modal penyertaan, dan cadangan. Perbedaan lain yang paling menonjol adalah laporan keuangan

koperasi terdapat laporan promosi ekonomi anggota yang menunjukkan bahwa anggota koperasi selama satu tahun tertentu telah memperoleh manfaat ekonomi. Akan tetapi dalam hal prosedur penataatan sampai pada penyusunan. Laporan keuangan koperasi adalah sama pada perusahaan lain.

PSAK No. 27 ini mengatur dan berisikan tentang :

1. Pendahuluan yang menjelaskan tentang karakteristik koperasi, struktur pengorganisasian koperasi, usaha dan jenis koperasi, tujuan dan ruang lingkup pernyataan ini serta istilah yang digunakan dalam pernyataan ini.
2. Penjelasan yang menjelaskan pos—pos ekuitas, kewajiban, aktiva, sorta pendapatan dan beban.
3. Laporan keuangan koperasi yang meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi, ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan. .

Laporan keuangan koperasi merupakan suatu pelaporan mengenai pertanggungjawaban kegiatan usaha kepada pihak luar yang mempunyai hubungan dengan koperasi baik: sebagai anggota koperasi maupun sebagai kreditur yang terdiri dari: (1) Neraca yang memberikan informasi mengenai sifat-sifat dan jumlah dalam pengelolaan aktiva dan kewajiban kepada kreditur koperasi, dan kekayaan bersih dari koperasi; (2) Laporan Perhitungan Hasil Usaha yang menggambarkan kegiatan operasi dan hasil operasi. Perhitungan hasil usaha tersebut menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban-beban perkoperasian selama periode tertentu; (3) Laporan Arus Kas

yang memberikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu; (4) Laporan Prognosis Ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu diekspresikan sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota; (5) Catatan Atas Laporan Keuangan yang memuat kebijakan akuntansi dan informasi lainnya yang perlu diungkapkan Koperasi Pegawai-Republik Indonesia (KP-RI " GKR " Rambah, berkedudukan di Jl. Diponegoro simpang Tugu Pasir Pengaraian Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan BH No.228/BH/PAD/KWK.4/51/1996. Untuk tahun 2008 keseluruhan anggotanya sebanyak 663 orang, dan total Aset sebesar Rp 2,169,858,317,25. Adapun kegiatan usaha Koperasi Pegawai-Republik Indonesia (KP- RI " GKR ") Rambah adalah Jasa Simpan Pinjam dan Wadai.

Dari hasil pengamatan awal laporan keuangan (terlampir) ternyata ada beberapa permasalahan yang ditemui pada KP- RI " GKR " Rambah sehubungan dengan bentuk dan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai dengan PSAK No. 27 antara lain:

Pada tahun 2008 KPRI "GKR" Rambah tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih padahal nilai piutang meningkat dari tahun sebelumnya hal ini dapat dilihat dalam neraca per 31 desember 2008 pada KPRI " GKR" Rambah, yang menunjukkan bahwa pada perkiraan piutang koperasi untuk tahun 2008 sebesar Rp. 1.453.644.299 dan untuk tahun 2007 sebesar Rp. 1.358.696.345 yang berarti piutang koperasi mengalami peningkatan tetapi pada perkiraan penyisihan piutang

tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 78.920.926 untuk tahun 2008, dan RP. 78.920.926 untuk tahun 2007, akibatnya beban dicatat terlalu rendah sehingga SHU yang dihasilkan tinggi. Selain itu pada aktiva tetap akumulasi penyusutan disajikan terpisah dengan nilai nettoanya dan koperasi belum menggabungkan perkiraan untuk simpanan sukarela dan SHU bagian anggota menjadi hutang simpanan anggota.

Pada koperasi Pegawai- Republik Indonesia (KP-RI “GKR”) Rambah penyajian perhitungan hasil Usaha (PHU) koperasi harus dipisahkan antara pendapatan dari partisipasi anggota dan pendapatan dari non anggota. Begitu juga dengan beban operasi harus dipisahkan antara yang menjadi beban usaha anggota dan mana yang menjadi beban usaha non anggota. Sehingga pembaca laporan keuangan tidak dapat mengukur sejauh mana partisipasi anggota dan non anggota dari total keseluruhan. Hal ini berpengaruh terhadap perhitungan sisa hasil usaha, karena sisa hasil usaha untuk anggota berasal dari pendapatan anggota yang diberikan sebanding dengan jasa yang diberikan kepada anggotanya.

Koperasi Pegawai-Republik Indonesia (KP-RI’GKR”) Rambah belum menyajikan laporan arus kas yang menyajikan tentang informasi mengenai perubahan kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan.

Didalam kegiatan operasionalnya KoperasiPegawai-Republik Indonesia (KP-RI “GKR”) Rambah, salah satu bidang usahanya adalah jasa unit simpan pinjam yang mana koperasi memberikan keringanan kepada anggotanya dalam memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah dari bunga bank dan proses

pemberian pinjaman mudah asalkan telah menjadi anggota koperasi. Bunga koperasi ditetapkan oleh pengurus melalui rapat anggota, sedangkan bunga bank mengikuti perkembangan pasar yang ditetapkan oleh BI (Bank Indonesia). Dengan demikian bunga yang ditetapkan oleh koperasi tidak membebankan anggotanya sehingga dapat bermanfaat sekali bagi anggota koperasi tersebut. Didalam laporan keuangan koperasi belum menyajikan laporan promosi ekonommi anggota sehingga tidak diketahui manfaat ekonomi.

Pada catatan atas laporan keuangan untuk KP-RI “GKR” Rambah hannya membuat penjelasan pos-pos pada laporan neraca namun perkiraan mini market tidak diungkap pada penjelasan pos neraca ini, sedangkan pada laporan perhitungan hasil usaha tidak dibuat penjelasan pos-posnya. Dan pengungkapan perlakuan akuntansi pada pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi dengan anggota dan non anggota.

Berdasarkan uraian sebagaimana yang dijelaskan diatas maka penulis ingin mengetahui dan meniliti lebih lanjut tentang penerapan PSAK No. 27 pada penyusunan laporan keuangan Koperasi Pegawai-Republik Indonesia (KP-RI”GKR”) Rambah Untuk itu penulis meneoba mengungkapkan pennasalahan ini dengan Judul : **“ANALISIS PENERAPAN PSAK N0. 27 PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI KP-RI “ GKR “ RAMBAH — ROKAN HULU.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis membuat suatu perumusan masalah yaitu: **“ Apakah penerapan akuntansi pada koperasi KP-RI “ GKR “ Rambah telah sesuai dengan PSAK N0. 27?**

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Apakah penyajian laporan keuangan KPRI

“GKR” Rambah telah sesuai dengan PSAK No. 27.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis dapat menambah wawasan mengenai penerapan PSAK N0.27 Pada KP-RI " GKR " Rambah.
- b Dapat memberikan informasi dan bahan masukan dalam usaha perbaikan dan menyempumakan sehubungan dengan penerapan PSAK N0. 27 bagi KP-RI " GKR " Rambah.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti dimasa yang akan datang untuk diteliti lebih lanjut.

D. Metode Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi KP-RI " GKR " Rambah yang berkedudukan di Jl. Diponegoro Simpang Tugu Pasir Pengaraian Rambah, Rokan Hulu.

2) Jenis dan Sumber Data

- a. Sumber data primer yang berasal dari wawancara langsung dengan pengurus dan karyawan koperasi mengenai kegiatan usaha koperasi, penjelasan mengenai piutang, kewajiban, pendapatan dan beban.

- b. Sumber data sekunder berbentuk sejarah perkembangan kepemsi, struktur organisasi dan laporan keuangan yang diperoleh dari pengurus koperasi.

3) Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pengurus koperasi dan karyawan koperasi serta ketua koperasi.
- b. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data, data koperasi, neraca, sisa hasil usaha serta struktur organisasi.

4) Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh digunakan metode deskriptif yaitu dengan menganalisis penyajian laporan keuangan yang dilaksanakan Oleh Koperasi KP-RI " GKR " Rambah kemudian membandingkan dengan PSAK NO.27 yang mengatur tentang usaha perkeperasian di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, penulis membagi dalam lima bab yang dirinci ke dalam beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Bab ini merupakan Bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini berisi telaah pustaka mengenai gambaran umum akumansi, gambaran umum badan usaha koperasi, karakteristik penyajian laporan keuangan koperasi, karakteristik penilaian dan penyajian neraca kepemsi, penyajian laporan perhitungan hasil usaha koperasi, penyajian laporan arus kas koperasi, penyajian laporan premosi

ekonomi anggota koperasi, penyajian eatatan ams laporan keuangan koperasi dan koperasi dalam islam.

BAB III :Bab ini berisikan gambaran umum koperasi, yang meliputi sejarah singkat kopersi, struktur orgnnisasi koperasi, dan aktivitas umum koperasi

BABIV :Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan terhadap laporan keuangan KP-Rl “ GKR ” Rambah yang meneakup peulaian dan penyajian neraea, penilaian dan penyajian perhitungan hasil usaha, penilaian dan penyajian arus kas, penilaian dan penyajian laporan promosi ekenomi anggeta dan penyajlan eatatan atas laperan keuangan

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan hasilpenelitian yang telah dilakukau, disamping itu penulis juga meneoba untuk memberikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagikoperasi

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Gambaran Umum Akuntansi.

Dalam suatu badan usaha baik erang yang terlibat langsung maupun tidak terlibat langsung dalam suatu badan usaha, akuntansi sangat bermanfaat dan menjadi kebutuhan bagi badan usaha tersebut. Kebutuhan ini berupa informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Terdapat berbagai pendapat yang dikemukakan oleh ahli ekonomi hubungan dengan definisi akuntansi. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut **Kusnadi (1999 : 7)** definisi akuntansi sebagai berikut:

Akuntansi adalah suatu seni atau keterampilan mengelola transaksi atau kejadian yang setidaknya-tidaknya dapat diukur dengan uang menjadi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau perusahaan yang nantinya digunakan dalam proses pengambilan keputusan bisnis.

Akuntansi menurut **Sadeli (2006 : 2)** adalah:

Proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat penimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut, termasuk dalam definisi ini adalah kebaruan bagi akuntansi untuk mengetahui lingkungan sosial ekonomi disekitarnya. Tanpa pengetahuan tersebut, mereka tidak akan mengidentifikasi dan membuat informasi yang relevan

Sedangkan menurut **Harahap (2001 : 3)** adalah:

Susunan, konsep, definisi, dalil yang menjelaskan hubungan antara variabel lainnya dalam struktur akuntansi dengan maksud dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena yang mungkin akan muncul.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, menunjukkan bahwa akuntansi bukan saja hanya mencakup fungsi pencatatan dalam menghasilkan informasi keuangan tetapi juga menyangkut fungsi-fungsi lainnya yang pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan informasi yang bersifat finansial kepada siapa saja yang memerlukan dari informasi tersebut. Dengan demikian akuntansi dapat dianikan sebagai keseluruhan pengetahuan yang sifatnya lebih luas dari pada teknik-teknik pencatatan semata.

Tujuan utama akuntansi menurut **Soemarso (1999 : 5)** adalah:

Menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari suatu kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam buku ini yang dimaksud dengan kesatuan ekonomi adalah badan usaha (*business enterprise*)

Penerapan akuntansi tidak mutlak, melainkan dapat berubah-ubah karena dalam penerapan antar perusahaan yang satu dengan yang lainnya berbeda. Namun setiap kesatuan suatu usaha mempunyai kewajiban dan keterikatan kepada ketentuan yang harus diikuti dalam mengelola transaksi keuangan. Oleh karena itu setiap laporan yang dihasilkan harus mengacu kepada prinsip akuntansi. Disamping itu, perbedaan bentuk usaha juga mempengaruhi perbedaan penerapan sistem dan prosedur akuntansi.

Menurut **Hendrojogi (2002 : 277)** dalam kegiatan usaha di Indonesia kita mengenal berbagai bentuk badan usaha yaitu

1. Badan usaha perorangan.
2. Badan usaha persekutuan, yang terdiri dari:
 - a. Persekutuan Firma.

- b. Persekutuan komanditer.
- 3. Badan usaha perseroan terbatas.
- 4. Badan usaha koperasi.
- 5. Badan usaha milik Negara.
- 6. Badan usaha milik Daerah.

B. Gambaran Umum Badan Usaha Koperasi

Di Indonesia koperasi diatur dalam undang-undang no. 12 Tahun 1967 yang diperbaharui menjadi undang-undang No. 25 Tahun 1992. Koperasi didefinisikan sebagai berikut :

Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Menurut **Hudiyanto (2002:48)** pengertian koperasi sebagai berikut:

Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk kepentingan hidupnya. Menanggapi keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya itulah yang dituju pada koperasi didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan.

Menurut **PSAK NO. 27 (2007 : 27.1)** koperasi dijelaskan sebagai berikut:

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Menurut pemerintah RI didalam **Undang—Undang NO. 25 Tahun 1992 pasal 4** dijelaskan fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gumunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Disamping fungsi dan peran koperasi dalam **UU NO. 25 Tahun 1992 pasal 5 (**

hal 4) juga diatur prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
 - c. Pembiayaan sisa hasil usaha dilaksanakan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
 - e. Kemandirian.
2. Dalam mengembangkan koperasi maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:
 - a. Pendidikan koperasi.
 - b. Kerja sama antar koperasi.

Untuk memperluas kegiatan operasionalnya maka koperasi harus memiliki keengkapan organisasi, seperti yang diuraikan dalam **UU NO. 25 Tahun 1992 pasal 21 (hal 19)** sebagai berikut:

- a. Rapat anggota.
- b. Pengurus.
- c. Pengawas.

a. Rapat anggota.

Secara umum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus dan bukan manajer. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sebagai penerminan demokrasi dalam yang beranggotakan orang-orang tanpa

mewakili aliran, golongan serta pabam politik perorangan, dan bak suara yang sama pada koperasi primer merupakan azas pokok dari penghidupan koperasi tersebut.

Menurut **Hendrojogi (2002 : 147)** rapat anggota memiliki tugas dan peran yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menyerahkan atau menetapkan penyusunan dan pembahan anggaran dasar atau anggaran nxmah tangga, sesuai dengan keputusan-keputusanrapat.
2. Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
3. Memberikan persetqiuhan dan perubabau dalam masalah struktur dan permodalan organisasi dan arah kegiatan-kegiatan usahanya.
4. Mensyaratkan agar pengurus, manajer dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar.
5. Menetapkan dan mengarahkan reneana kerja, reneana anggaran pendapatan dan belanja erganisasi.
6. Menetapkzm pembagian sisa hasil usaha.
7. Menetapkan peuggabungan, pemoeahan dan pembubaran organisasi.
8. Memberikan penilaian terhadap penanggnmgjawaban pengurus menerima atau menolak.

b. Pengurus.

Didalam **UU No. 25 Tahun 1992 pasal 30 (hal 28)** dijelaskan temang tugas dan peran pengurus kopemsi.

Adapun tugas pengurus kopemsi antara lain:

1. Mengelela kopemsi dan usahanya.
 2. Mengajukan mneana kerja sena raneangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
 3. Penyelenggaraan rapatanggota.
 4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan inventaris seeara tenib.
 6. Memelihara dahar buku anggota keperasi dan peugawas.
- Dan wewenang pengurus meliputi:
1. Mewakili koperasi didalam dan diluar pengabdian.
 2. Memutuskan penerimaan dan, penolakan anggota baru sertamemberhentikan anggota sxuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
 3. Melakukan Lindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

c. Pengawas.

Adapun tugas dan wewenang pengawas ditegaskan dalam **UU No. 2 Tahun 1992 pasal 39(hal 37)** adalah sebagai berikut:

1. Pengawas bertugas:
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
 - b. Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan.
2. Pengawas berwenang:
 - a. Meneliti eamtan yang ada pada koperasi.
 - b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
3. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.

C. Karakteristik Penyajian Laporan keuangan Koperasi

Dalam rangka pengembangan prinsip koperasi Indonesia menjadi SAK, maka pernyataan prinsip akuntansi Indonesia No. 3 tentang akuntansi koperasi telah disesuaikan seperlunya menjadi PSAK No. 27 tentang Akuntansi koperasi, perlunya standar khusus akuntansi untuk ini dikarenakan koperasi memiliki eiri yang berbeda dengan badan usaha lain seperti pemerintah dan swasta, jika ditinjau dari organisasi, eam pengelolanya maupun permodalarnya.

PSAK N0. 27 ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi yang timbul dari hubuugan transaksi antam koperasi dengan anggoumya dan transaksi lain yang spesifnk pada koperasi. Pernyataan ini meneakuppengakuan, penguknn-an penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Ruang lingkup **PSAK N0. 27 (IAI), 2002 : 273-274) :**

1. Pernyataan ini mengatur akuntansi bagi badan usaha keoperasi atas tmnsaksi koperasi yang timbul dari hubungan bagi anggotanya, yaitu meliputi tmnsaksi setoran anggota koperasi dan transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, dan transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi, dianmra eadangan modal penyertaan, modal sumbangan beban- beban koperasi sem penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.
2. Pernyataan ini tidak mengatur akuntansi uansaksi yang timbul dari hubungan koperasi dengan anggotnya. Transaksi tersebar diperlukan sama dengan transaksi yang tmjadi pada badan usaha lainnya.

3. Hal-hal yang bersifat umum atau tidak secara khusus diatur dalam pernyataan ini, termasuk alternatif untuk unit usaha ekonomi koperasi, harus diperlakukan dengan mengacu pada PSAK yang lainnya.
4. Pernyataan ini berlaku bagi laporan keuangan untuk disajikan kepada pihak eksternal yaitu anggota koperasi, pemerintah, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan.
5. Pemerintah sebagai salah satu pihak pemakai laporan keuangan koperasi, mungkin memerlukan informasi khusus untuk tujuan tertentu. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan untuk kepentingan pemerintah tersebut. Penyajian informasi khusus ini diatur dalam pedoman akuntansi tersendiri yang mengacu pada PSAK No. 27.
6. Berbagai jenis koperasi, misalnya koperasi konsumen dan koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, dan koperasi pemasaran dalam penyajian laporan keuangan dapat memilih pedoman kekhususan masing-masing dan untuk itu dapat diatur dalam pedoman akuntansi tersendiri dengan mengacu kepada PSAK No. 27 ini.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari pengelolaan data akuntansi badan usaha digunakan untuk keperluan pihak-pihak yang berhubungan dengan badan usaha baik sebagai pemilik, kreditur, maupun calon pemilik atau calon kreditur. Keperluan tersebut berupa pertimbangan keputusan mengenai penilaian terhadap arus kas masa mendatang perkembangan kegiatan usaha, likuiditas, solvabilitas, dan lain sebagainya.

Menurut **Sofyan Syafri Harahap, (2000 : 68)** Tujuan laporan keuangan adalah :
Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Menurut **Sitio (2001 : 107)** Tujuan laporan keuangan koperasi adalah:

1. Menilai pertanggungjawaban pengurus
2. Menilai prestasi pengurus
3. Menilai manfaat yang diberikan koperasi terhadap anggotanya
4. Menilai kondisi keuangan koperasi
5. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan jumlah sumberdaya dan jasa yang akan diberikan kepada koperasi.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus memiliki karakteristik-karakteristik tertentu agar informasi tersebut bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan.

Menurut **IAI (2002: 7-10)** karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki

adalah sebagai berikut :

a) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dapat segera dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemampuan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar, namun demikian informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu

b) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa lalu dan masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu

c) Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus hakikat informasi saja tidak cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian resiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen tersebut dalam periode pelaporan. Dalam kasus lain, baik hakikat maupun materialitas dipandang penting, misalnya jumlah serta kategori persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

d) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga yang harus andal atau reliabel. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengenaian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (faithful representation) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

e) Penyajian jujur

Informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan untuk disajikan.

f) Substansi Mengungguli Bentuk

Jika transaksi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu diekspresikan dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya.

g) Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan terfokus pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu,

h) Pertimbangan Sehat

Penyusunan laporan keuangan adalah yang menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, perkiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas garansi yang mungkin timbul.

Ketidakpastiaan ini diakui dengan mengungkapkan hakikat dan tingkatnya serta dengan menggunakan pertimbangan sehat (Prudence) dalam penyusunan laporan keuangan.

i) Kelengkapan

Informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (Omission) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

j) Dapat dibandingkan

Pemakai harus dapat mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi dan kinerja keuangan

Didalam **Harahap (2001 : 40-41)** Prinsip-prinsip akuntansi sebagai pedoman

dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara umum bertujuan untuk :

1. Dapat menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, prestasi dan kegiatan perusahaan.
 2. Memberikan pedoman dan peraturan bekerja bagi akuntansi agar mereka melaksanakan tugas dengan hati-hati independen dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan keuangan setelah melalui pemeriksaan
 3. Memberikan database kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan dan pengaturan ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan makro lainnya.
 4. Dapat menarik perhatian para ahli, praktisi di bidang teori dan prinsip akuntansi. Semakin banyak teori dan prinsip yang dikeluarkan semakin banyak kontroversi dan semakin bergairah untuk berdebat polemik dan penelitian
- Sedangkan khusus untuk badan usaha koperasi, dalam Standar Akuntansi

Keuangan No. 27 (**IAI 2002 : 12-27**) menjelaskan bahwa laporan keuangan koperasi

terdiri dari laporan-laporan sebagai berikut :

1. Neraca
2. Perhitungan laba rugi
3. Laporan arus kas
4. Laporan promosi ekonomi anggota
5. Catatan atas laporan keuangan.

D. Karakteristik Penilaian dan Penyajian Laporan Neraca Koperasi

Neraca dapat diartikan sebagai laporan yang menunjukkan keadaan keuangan

suatu unit usaha yang terjadi pada tanggal tertentu, biasanya pada tanggal terakhir suatu tahun, akhir semester atau laporan akhir bulan,

Definisi neraca menurut **Siswanto Sutojo (2000 : 1)** adalah sebagai berikut:
Laporan keuangan yang melaporkan secara ringkas jenis dan jumlah harta yang dapat dinyatakan dalam satuan uang, dan modal sendiri yang dimiliki perusahaan pada tanggal tertentu.

Sedangkan menurut **Riva'I (1999 :12)** definisi neraca pada badan usaha koperasi adalah sebagai berikut :

Suatu daftar baik yang disusun pada waktu berdirinya perusahaan atau koperasi (neraca pembukuan) atau yang disusun pada saat tertentu selama tahun pembukuan atau periode pembukuan masih berjalan (neraca bulanan tahunan) dinyatakan dalam bentuk angka-angka dan bentuk perkiraan semesta account atau syarat atau reperform dalam hal mana hal atau aktiva, hutang atau pasiva dan modal pada saat tertentu atau periode tertentu yang dinyatakan dalam bentuk uang atau nilai uang.

Definisi neraca menurut **Siswanto Sutojo (2000 : 1)** adalah sebagai berikut :

Laporan keuangan yang melaporkan secara ringkas dan jumlah harta yang dapat dinyatakan dalam satuan uang, hutang dan modal sendiri yang dimiliki perusahaan pada tanggal tertentu

Unsur-unsur penyajian neraca

Bagian kiri dari neraca.

Terdiri dari pos-pos aktiva antara lain:

1. Aktiva lancar
2. Investasi jangka panjang,
3. Aktiva tetap
4. Aktiva lain-lain.

Bagian kanan dari neraca.

Terdiri dari pos-pos antara lain

1. Kewajiban jangka pendek.
2. Kewajiban jangka panjang

3. Ekuitas

A. Aktiva (Asset)

Kieso (2002 : 55) mendefinisikan aset sebagai berikut :

Kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu perusahaan sebagai hasil dari transaksi kejadian yang lalu.

Sehubungan dengan badan usaha koperasi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan asset pada koperasi dapat dilihat dalam PSAK No. 27 tahun 2007 sebagai berikut

1. Asset yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutupi kerugian koperasi diakui sebagai asset lain-lain. Sifat keterikatan penggunaan tersebut diatas dijelaskan dalam eatatan atas laporan keuangan.
2. Asset-aset yang dikelola koperasi tetapi bukan milik koperasi, tidak diakui sebagai dan hams dijelaskan dalam eatatan atas laporan keuangan.

Sebagai penggerak ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional, koperasi sexing mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam bentuk bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya.

Barang modal tersebut dapat diakui sebagai asset tetap milik kopemsi walaupun asset-aset tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutupi kerugian. Dalam hal asset tersebut tidak menutupi kerugian sebagai mana yang diisyaratkan oleh penyumbanganya atau telah ditetapkan dalam perjanjian (akte penerimaan) sumbangan, maka asset tetap tersebut dikelompokkan dalam asset lain-lain. Sifat dan pembatasan asset tersebut hams dijelaskan dalam eatatan atas laporan keuangan

1. Aktiva Lancar (Current Asset)

Pada tunumuya aturan yang dipakai yang dapat dikelompokkan sebagai lmnna lancar jika suatu harta dirubah menjadi kas atau digunakan untuk membayar kewajnaan

linear didalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi mana yang lebih panjang maka harta itu dildasifikasilmn sebagni harta linear.

Menurut **Riva'I (1999 : 29)** pengertian asset linear adalah sebagai berikut:

Harta yang tidak tinggal temp bertahun-tahun pada perusahaan atau koperasi tapi dalam jangka waktu yang singkat dapat dikeluarkan dengau barang lain.

Suatu aktiva diklasifikasnkkan sebagni aktiva linear, jika aktiva tersebut:

- a) Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki tmtuk dijual atau dignmakan.
- b) Dimiliki untuk diperdagungkan atau untuk tujuan jangka pendek dau diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal ueraea.
- c) Berupa kas atau setam kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Menurut **Riva'! (1999: 29-30)** klasifikasi aktiva linear adalah

- 1. Hartatunai/kas/bank
- 2. Piutang
- 3, Persediaan (barang dagang)
- 4. Lain-lain.

a. Kas/Bank

Menurut **IAI (2004 : 27)** pengertian kas dan bank dalam penyajian asset linear dan kewajiban jangka pendek menyatakan sebagai berikut :

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Bank ialah sisa rekening giro perusahaan yang dapat digunakan seeara bebas nmtuk membiayai kegiatan umum perusahaan .

b. Penilaian Kas/Bank

Penentuan nilai kas dan bank tidak menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan karena kas dan bank telah menunjukkan nilai yang melekat pada kas dan bank sesuai dengan fungsinya sebagai alat pengukur nilai.

c. Penyajian Kas/Bank

Untuk keperluan penyajian laporan keuangan kas dan bank disajikan dengan mengacu pada IAI (2004 : 27) sebagai berikut :

1. Kas dan Bank milik koperasi yang wewenang penggunaannya dibatasi, disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktiva lancar dan aktiva jangka panjang tergantung pada jangka waktu pembatasannya.
2. Kas dan Bank secara terpisah sebagai aktiva titipan. Kewajiban yang bersangkutan dengan kas dan bank tersebut disajikan sebagai pengurang atas aktiva titipan tadi. Dalam hal ini terjadi saldo kredit sebagai akibat dari pengurangan ini, maka saldo kredit disajikan sebagai kewajiban lancar.

d. Piutang

Piutang menunjukkan tagihan yang timbul dari penjualan barang atau jasa yang dihasilkan, piutang yang timbul bukan dari barang atau jasa yang dihasilkan, dikelompokkan dalam piutang lain-lain

Piutang yang timbul dari penjualan atau penyerahan jasa pada anggota koperasi dengan non anggota koperasi dipisahkan dengan tujuan agar dapat memberikan informasi seberapa besar manfaat yang diberikan kepada anggota koperasi serta mengevaluasi tingkat keberhasilan dan keterkaitan koperasi.

e. Penilaian Piutang

Penilaian piutang dinyatakan sebesar jumlah tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat diterima. Dalam hal tersebut dapat diketahui bahwa untuk melaporkan piutang dalam neraca adalah sebesar jumlah yang akan direalisasikan yaitu jumlah yang diharapkan dapat ditagih.

f. Penyajian Piutang

Piutang yang terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan kepada anggota maupun kepada non anggota disajikan terpisah di neraca sesuai dengan klasifikasi piutang.

Sesuai dengan lampiran PSAK NO,27 penyajian piutang harus dipisahkan menjadi piutang usaha, piutang pinjaman anggota, piutang non pinjaman anggota, dan piutang lain-lain.

g. Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Dalam **IAI (2002 : 9.3)** pengertian penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut:

Piutang dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan dikurangi dengan taksiran jumlah yang tidak dapat ditagih, jumlah kotor piutang harus tetap disajikan pada neraca diikuti dengan penyisihan untuk piutang yang diragukan tidak dapat ditagih.

Menurut **Kieso (2002 : 390)** mendefinisikan penyisihan piutang tak tertagih sebagai berikut :

Piutang usaha tak tertagih adalah kerugian pendapatan, yang memerlukan, melalui ayat jurnal penyesuaian yang tepat dalam akun penurunan aktiva piutang usaha serta penurunan yang berkaitan dengan laba dan ekuitas pemegang saham.

Adakalanya dapat dipastikan piutang kepada seorang debitur tertentu tidak dapat ditagih lagi, maka piutang tersebut harus dihapuskan dari pembukuan oleh perusahaan. Sebagai akibat dari penghapusan piutang langganan tersebut, maka saldo piutang tidak muncul lagi dalam rekening piutang, yang artinya bahwa saldo piutang tersebut dikeluarkan dan catatan piutang perusahaan dengan mengkreditnya.

Sedangkan menurut **Niswonger (1999 : 327)** menjelaskan beberapa faktor penyebab tidak tertagihnya piutang sebagai berikut :

Apabila debitur bangkrut bamlah ada petunjuk pasti ba.hwa ada sebagian atau seluruh piutang terhadap pelanggan tersebut tidak dapat ditagih, petunjuk lainnya adalah perusahaan debitur itu tutup, debitur kabur, penagihan yang berkali-kali yang terus saja gagal dan pembatasan penagihan oleh ketentuan Undang-Undang. Selanjutnya pada **Niswonger(1999 : 361)** mengenai piutang tak tertagih adalah: Bila suatu barang ataupun jasa dijual secara kredit, biasanya sebagian dari klaim terhadap pelanggan tersebut tak tertagih. Hal ini merupakan gejala umum, betapapun teliti waktu memberikan kredit! dan betapapun efektifnya prosedur penagihan piutang yang digunakan. Beban operasi yang timbul karena tidak tertagihnya piutang, disebut beban atau kerugian dari piutang yang tak tertagih (uncollectible account); piutang ragu-ragu (doubtful accounts), atau piutang macet (bad debts).

Dalam metode penyisihan setiap akhir periode dilakukan penaksiran jumlah kerugian piutang. Biasanya dalam menghitung penyisihan piutang tak tertagih ini ada dua dasar yang digunakan yaitu :

1. Kerugian piutang dihitung atas dasar jumlah penjualan.

Kerugian piutang dihitung dengan mengalikan presentase tertentu dengan jumlah penjualan yang ada pada periode bersangkutan. Presentase tersebut biasanya diperoleh dari pengalaman sebelumnya atas jumlah piutang yang telah dihapus. Dengan contoh perhitungan sebagai berikut:

Presentase kerugian % X Rp xxx : Rp xxx

Estimasi kerugian penyisihan piutang : Rp xxx

Jumlah penyisihan piutang dineraca : Rp xxx

. Jumlah yang harus dibuat adalah :

Beban piutang macet Rp xxx

Penyisihan piutang tak tertagih Rp xxx

2. Kerugian piutang dihitung berdasarkan jumlah saldo piutang.

a. penetapan jumlah penyisihan dengan tingkat presentase tertentu dari saldo piutang yang beredar,

Dengan menggunakan metode ini, jumlah dari piutang tak tertagih adalah persentase dari jumlah saldo piutang pada akhir periode, dengan cara mengalikan saldo piutang dengan presentase tertentu. Dengan contoh perhitungan sebagai berikut :

Persentase kerugian % X Rp xxx : Rp xxx

Estimasi kerugian Penyisihan piutang : (Rp xxx)

Jumlah penyisihan piutang dineraca : Rp xxx

Jumlah yang harus dibuat adalah

Beban piutang tak tertagih Rp xxx

Penyisihan piutang tak tertagih Rp xxx

b. Penetapan jumlah penyisihan dihitung dengan menganalisa umur piutang.

Metode ini dikenal sebagai metode analisis umur piutang, pada metode ini piutang dikelompokkan dalam dua kelompok yaitu menunggak dan tidak menunggak. Memunggak maksudnya adalah piutang yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar oleh pelanggan, sedangkan piutang yang tidak menunggak adalah piutang yang sudah dibayar oleh pelanggan saat piutang tersebut jatuh tempo untuk dibayar.

h. Persediaan.

Persediaan barang dagangan dalam badan usaha koperasi yaitu barang-barang yang dimiliki oleh koperasi atau belum dijual pada suatu saat tertentu dengan maksud untuk dijual kembali dalam siklus operasional normal perusahaan (dalam jangka waktu satu tahun).

Menurut **IAI (2004 : 275)** beberapa karakteristik lmdsus sehubungan dengan akuntansi persediaan pada koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Persediaan pada koperasi dapat digolongkan menjadi persediaan komoditi program dan komoditi umum. Komoditi program adalah komoditi yang memperoleh fasilitas dari pemerintah dan pada umumnya mencakup program pengadaan dan penyaluran,
- b. Selain harga beli jumlah kewajiban koperasi sehubungan dengan transaksi untuk mendapatkan komoditi program mencakup berbagai jenis yang ditetapkan oleh pemerintah dan gerakan koperasi itu sendiri.

i. Penilaian persediaan

Pada dasarnya persediaan dicatat dan nilai sebesar harga perolehan, tetapi karena pembelian komoditi program harga beli koperasi juga dibebani dengan pembayaran-pembayaran khusus, dimana sebagian diantaranya dapat diterima kembali di kemudian hari. Pada umumnya persediaan dinyatakan dalam neraca sebesar harga pokok persediaan barang dagangan yang bersangkutan, yang terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

2. Investasi Jangka Panjang.

Investasi jangka panjang atau penyerahan atau penanaman modal diluar koperasi. Menurut IAI (2004: 27) beberapa karakteristik yang terdapat dalam akun investasi yaitu sebagai berikut :

1. Penyerahan uang yang sifatnya permanen (jangka waktu yang tidak terbatas dan tidak dapat diperjual belikan)
2. Penyertaan yang jumlahnya selalu bertambah dalam jangka waktu tertentu dan umumnya tergabung pada ketentuan dalam dasar: rumah tangga koperasi.
3. Penyertaan yang dapat diambil sewaktu-waktu dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan dan tidak dapat diperjual belikan.

a. Penilaian Investasi

Investasi yang mempunyai sifat jangka panjang dicatat dengan metode harga pokok, investasi pada koperasi wewenang peneairannya merupakan investasi yang jatuh tempo belum pasti.

b. Penyajian Investasi

Menurut **PSAK NO. 27** ketentuan mengenai investasi sebagai berikut :

1. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dicatat sebesar jumlah nominal setoran. Dalam hal modal penyertaan yang diterima selain uang muka modal penyertaan tersebut dinilai sebesar harga pasar yang berlaku pada saat diterima.

2. Modal penyertaan itu! menutupi resiko kerugian dan memiliki sifat! Atas hasil yang diperoleh. Oleh karena itu modal penyertaan diakui sebagai ekuitas.

3. Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut keuntungan atau hasil usaha tanggung kerugian jangka waktu dan hak pemodal harus dijelaskan dalam catatan laporan keuangan.

3. Aktiva Tetap (fixed Asset)

Aset tetap adalah aset yang jangka waktu pemakaian lama yang digunakan dalam kegiatan perusahaan dan memiliki tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal perusahaan serta nilainya cukup besar.

a. Penilaian aset tetap

Aset tetap dinilai sebesar harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Penyusutan aset tetap merupakan suatu alokasi harga perolehan aset tetap periode-periode akuntansi. Aset tetap dari pemerintah yang dikelola atas dasar revolving jimd merupakan bantuan (donasi) pemerintah kepada koperasi dan ditetapkan sebesar harga perolehan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelola aset tetap tersebut akan merupakan bagian sisa hasil usaha koperasi dan disisihkan untuk keadaan revolving.

Disamping aset tetap donasi, pemerintah kadang kala juga memberikan bantuan lunak aset tetap pada koperasi yang pembayarannya dilakukan dengan penyisihan dana-dana tertentu yang dikaitkan dengan transaksi pembelian atau penjualan komoditi tertentu. Aset tetap ini diakui sebagai milik koperasi dengan merekrut kewajiban.

b. Aktiva Lain-lain

Pada perkiraan ini dimasukkan semua pos-pos yang tidak dapat dimasukkan pada perkiraan lainnya. Termasuk juga termasuk dari aktiva ini adalah aktiva tetap dalam konstruksi dan beban yang ditanggungkan.

B. Kewajiban

Kewajiban pada beban usah koperasi merupakan kewajiban kepada pihak luar bukan pemilik yang timbul akibat transaksi perolehan sumber daya ekonomi yang dilakukan sehingga mengakibatkan arus kas keluar dimasa yang akan datang. Kewajiban dinilai sebesar kejadian dalam transaksi, biasanya jumlah yang akan dibayar dimasa yang akan datang biasanya didiskontokan (dinilai berdasarkan present value untuk jangka panjang), sejumlah nilai pertukaran, sejumlah nilai nominal.

Menurut **Mardiasmo (2000 : 34)** kewajiban yang dimiliki badan usaha dapat dikelompokkan berdasarkan jatuh temponya sebagai berikut:

1. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang diharapkan dapat dilunasi dalam jangka waktu paling lama satu periode akuntansi (satu tahun), dengan menggunakan sumber-sumber yang merupakan aktiva lancar atau dengan menimbulkan utang lancar yang lain.
2. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu periode akuntansi.

1. Kewajiban Jangka Pendek

Menurut **IAI (2004 : 27-10)** kewajiban jangka pendek pada koperasi terdiri dari yaitu:

- a. Hutang usaha
- b. Hutang bank
- c. Hutang pajak
- d. Hutang simpanan anggota
- e. Hutang dana bagian SHU
- f. Hutang jangka panjang akan jatuh tempo
- g. Biaya yang masih harus dibayar.

2. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang pelunasannya dalam waktu lebih dari satu tahun dan bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo tahun yang akan datang dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Kewajiban koperasi dapat timbul karena pembelian

barang dan jasa kepada anggota dan non anggota atau pada koperasi lain, pembagian sisa hasil usaha dan kewajiban pada kopemsi lain, untuk meuanggung kerugian koperasi tersebut. Pada kopemsi, kewajiban jangka panjang terdiri dari pos-pos sebagai berikut:

- a. Hutang bank
- b. Hutang jangka panjang lainnya.

a. Penyajian kewajiban

Untuk penyajian kewajiban ini pada neraca diatur dalam **PSAK No. 27 tahun 2007** dengan ketentuan sebagai berikut;

Simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai dengan tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Simpanan uang yang berkarakteristik sebagai ekuitas adalah jumlah tertentu dalam nilai yang diserahkan anggota pada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu sesuai dengan perjanjian simpanan ini tidak menanggung resiko kerugian dan sifatnya sementara karena diakui sebagai kewajiban.

Kewajiban sukarela harus diakui sebagai hutang jangka pendek karena itu dapat dianggap sebagai kekayaan bersih. Hal ini disebabkan karena anggota dapat mengambil simpanan sukarela.

Kewajiban yang timbul dari sisa hasil usaha seperti dana pembangunan daerah kerja, dana pendidikan, dana sosial, dana untuk pengurus dan karyawan dipandang sebagai kewajiban karena sisa hasil usaha yang merupakan hak koperasi adalah sisa hasil usaha yang disebabkan untuk cadangan

3. Ekuitas.

Modal koperasi merupakan jumlah nilai yang ditanamkan dalam sumber- sumber daya ekonomi koperasi atau selisih koperasi antara harta dengan kewajiban. Modal koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal donasi, eadangan sisa hasil usaha tahun berjalan dan tahnem sebelumnya yang masih belum dibagrkan.

Menurut **IAI (2007 : 27.4-27.6)** beberapa karakteristik dan penyajian modal koperasi adalah sebagai berikut:

a. Modal anggota

1. Simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib diakui sebagai ekuitas koperasi dan dieatat sebesar nilai nominalnya.
2. Simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.
3. Kelebihan setoran sirnpunan pokok dan simpauan wajib anggota pendiri diakui sebagai modal penyertaan panisipasi anggota.

b. Modal penyertaau

1. Modal penyertaan diakui sebagai ekuitas dan dieatat sebesar jumlah nominalsetorandalam hal modal penyertaan selain uang nmai maka modal penyertaan tersebut diakui sebesar harga pasar yang berlaku umum.
2. Ketentuan mengenai perjanjian dengan pemodal yang menyangkut dengan pembagian keuntungan atau sisa hasil usaha, tanggxmgan kerugian, jangka waktu dan hak-hak pemodal harus dijelaskan dalam eatatan alas laporan keuangan.

c. Modal sumbangan

Modal sumbangan yang diterima oleh koperasi yang dapat menutupi rmiko kemgian diakui sebagai ekuitas, sodangkan modal sumbangan yang substansinya merupakan pinjaman diakui sebagai kewajiban jangka panjang dan dijelaskan dalam eatatan alas laporan keuangan.

d. Cadangan.

1. Cadangan dan tujuan penggunaannya dijelaskan dalam eatatan alas laporan keuangan.
2. Pembayaran tambahan hepada anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi diatas jumlah pokok dan simpanan wajlbserta simpanan lain-lain dlbebankan kepada eadangan.

Seeara formal, anggota koperasi dapat diakui jlka ia telah menyetor uang sejumlah

tertentu sebagai simpanan pokok pada saat penama meujadi anggota, disamping itu ia juga hams menyetor uang sejumlah tenentu seeara berkala sebagai simpanan wajib.

Walaupun simpanan pokok dan simpanan wajib dapat diambil kembali jika yang bersangkutan keluar dari anggota koperasi, namun diasumsikan bahwa anggota koperasi akan tetap menjadi anggota dalam waktu yang tidak terbatas. Dengan demikian simpanan pokok dan simpanan wajib tersebut bersifat permanen.

Pembayaran simpanan pokok dan simpanan wajib dapat dilakukan dengan cara angsuran yang jumlah dan lamanya ditetapkan dalam anggaran dasar atau ketentuan lainnya.

Simpanan pokok dan simpanan wajib dinilai adalah menyajikan nilai nominal simpanan pokok dan simpanan wajib. Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang belum diterima dari anggota disajikan sebagai piutang simpanan pokok dan simpanan wajib.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, maka disajikan contoh neraca yang disusun berpedoman kepada PSAK NO. 27 Tahun 2007 yang dapat dilihat pada tabel II. 1

Tabel II.1
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
NERACA
31 Desember 20X1 dan 20X0

AKTIVA 20X1			KEWAJIBAN DAN EKUITAS 20X1		
20X0			20X0		
AKTIVA LANCAR			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Kas dan Bank	Rp xxxx		Hutang usaha	xxxx	xxxx
Rp xxxx			Hutang bank		xxxx
Investasi Jangka Pendek	xxxx	xxxx	xxxx		
Piutang usaha	Rp xxxx	xxxx	Hutang pajak		xxxx
Piutang pinjaman anggota	xxxx	xxxx	xxxx		
Piutang pinjaman Non Anggota	xxxx	xxxx	Hutang simpanan anggota		xxxx
Piutang Lain-Lain	xxxx	xxxx	xxxx		
Peny.piutang tak tertagih	(xxxx)	(xxxx)	Hutang dana bagian SHU		xxxx
Persediaan	xxxx	xxxx	xxxx		
Pendapatan akan diterima	<u>xxxx</u>		Hutang jangka panjang		xxxx
<u>xxxx</u>			xxxx		
Jumlah aktiva lancar	Rp <u>xxxx</u>		Akan jatuh tempo		xxxx
Rp <u>xxxx</u>			xxxx		
INVESTASI JANGKA PANJANG			Biaya harus dibayar		xxxx
Penyertaan pada koperasi	xxxx		xxxx		
xxxx			Jumlah kewajiban jangka pendek	Rp xxxx	
Penyertaan pada non kop	xxxx	xxxx	xxxx		
Jumlah investasi jangka panjang	<u>Rp. xxxx</u>		KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
xxxx			Hutang bank		xxxx
AKTIVA TETAP			xxxx		
Tanah/hak atas tanah	xxxx	xxxx	Hutang jangka panjang lainnya		xxxx
Bangunan	xxxx	xxxx	xxxx		
Mesin		xxxx	Jumlah kewajiban jamgka panjang	<u>Rp xxxx</u>	
xxxx			<u>xxxx</u>		
Inventaris	xxxx	xxxx	EKUITAS		
Akumulasi penyusutan	<u>(xxxx)</u>		Sinpanan wajib		xxxx
<u>(xxxx)</u>			xxxx		
Jumlah aktiva tetap	<u>Rp xxxx</u>		Simpanan pokok	xxxx	
Rp <u>xxxx</u>			xxxx		
AKTIVA LAIN-LAIN			Modal penyertaan	xxxx	
Ak. Tetap dalam konstruksi	Rp xxxx		xxxx		
Rp xxxx			Partsipasi anggota		xxxx
Beban ditanggungkan	<u>xxxx</u>		xxxx		
xxxx			Modal penyertaan		xxxx
Jumlah aktiva lain-lain	<u>Rpxxxx</u>		xxxx		
Rp <u>xxxx</u>			Modal sumbangan		xxxx
JUMLAH AKTIVA LAIN-LAIN	<u>Rp xxxx</u>		xxxx Cadangan		xxxx
<u>Rp xxxx</u>			xxxx		
JUMLAH AKTIVA	<u>Rp. xxxx</u>		SHU belum dibagi	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
<u>Rp xxxx</u>			Jumlah ekuitas	<u>xxxx</u>	
			<u>xxxx</u>		
			JUMLAH KEWAJIBAN		
			DAN EKUITAS		
				<u>xxxxx</u>	
			<u>xxxxx</u>		

E. Penyajian Laporan Perbitungan Hasil Usaha Koperasi.

Perhitungan basil usaba merupakan pengganti laporan mgi laba yang dianjurkan mengingat manfaat dari usaba koperasi tidak semata-mata banyadiukur dari laba tetapi lebih ditekankan pada manfaat untuk anggota, oleh karena itu koperasi tidak mengimakan istilah laba mgi melainkan sisa basil usaba.

Perbitungan basil usaba berrujuan untuk menentukan sisa basil usaba yang diperoleh selama satu periods dengan membandingkan amara pendapatan yang diperoleh selama satu periode dengan beban yang dikeluarkan selama satu periodamenurut UU No. 25 tahun 1992 dikutip dari **Anoraga (2003 : 29)** tentang perkoperasian adalah sebagai berikut:

Sisa basil usaba koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai penyajian ini diatur **Standar Akuntansi Keuangan N0. 27 tahun 2007** sebagai berikut:

1. Sisa basil usaba tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal jenis dan jumlah pembagiannya sisa basil usaba telah diatur secara jelas, maka bagian yang tidak menjadi hak koperasi diakui sebagai kewajiban.
3. Apabila jenis dan jumlah pembagiannya dirumuskan secara jelas, maka sisa basil usaba tersebut dicatat sebagai sisa basil usaba yang belum dibagi dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
4. Perbitungan basil usaba harus memuat usaba dengan anggota dan laba rugi kotor dan non anggota.

Suatu kebiasaan dalam koperasi, bahwa sisa hasil usaha yang diperoleh dalam satu tahun berjalan dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan rumah tangga. Keharusan pembagian sisa hasil usaha tersebut juga dinyatakan dalam undang-undang perkoperasian. Penggunaan sisa hasil usaha tersebut diantaranya untuk anggota, dana

pendidikan, sosial dan dana untuk koperasi sendiri. Jumlah yang merupakan hak koperasi disebut sebagai cadangan.

Pembagian sisa hasil usaha tersebut dilakukan pada akhir periode pembukuan. Dan jumlah yang dialokasikan untuk selain koperasi diakui sebagai kewajiban. Dalam hal pembagian tidak dapat dilakukan karena jenis dan jumlah bagiannya belum diatur secara jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan masih menunggu rapat anggota. Maka sisa hasil usaha tersebut dicatat sebagai sisa hasil usaha yang belum dibagi dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Perhitungan sisa hasil usaha menurut pos-pos pendapatan dan pos-pos beban yang terjadi selama satu periode. Menurut IAI (2004 : 27.11) pendapatan dan beban disajikan sebagai berikut:

1. Pendapatan koperasi yang timbul dari transaksi dengan anggota diakui sebagai pendapatan partisipasi bruto.
 2. Pendapatan koperasi yang berasal dari transaksi dengan non anggota diakui sebagai pendapatan (penjualan) dan dilaporkan terpisah dari partisipasi anggota dalam perhitungan sisa hasil usaha sebesar nilai transaksi. Selisih antara pendapatan dan beban pokok transaksi dengan non anggota diakui sebagai bagian laba rugi kotor dengan non anggota.
 3. Beban usaha dan beban perkoperasian harus disajikan terpisah dalam laporan perhitungan hasil usaha.
- Perhitungan hasil usaha memuat penghitungan tersendiri antara pendapatan yang berasal dari anggota dan non anggota. Tujuan pemisahan ini adalah sebagai berikut:
- a. Menentukan besarnya manfaat menjadi anggota koperasi.
 - b. Menentukan tingkat keterkaitan usaha koperasi anggota dengan usaha keropasinya.
 - c. Untuk menentukan besarnya sisa hasil usaha dari anggota dan bukan anggota guna penerapan pajak penghasilan dan pembagian sisa hasil usaha.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan contoh laporan perhitungan hasil usaha yang disusun berpedoman kepada PSAK No. 27 Tahun 2007 yang dapat dilihat pada tabel II. 2.

TABEL II. 2
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0

	20X0	20X1
PARTISIPASI ANGGOTA		
Partisipasi Bruto Anggota	Rp xxx	
Rp xxx		
Beban Pokok ·	(xxx)	
(xxx)		
Partisipasi Netto Anggota	<u>Rp xxx</u>	
Rp xxxx		
PENDAPATAN DARI NON-ANGGOTA		
Penjualan	Rp xxx	
Rp xxx		
Harga Pokok	(xxx)	
(xxx)		
Laba/Rugi Kotor deugan non anggota	<u>Rpxxx</u>	
Rpxxx		
Sisa Hasil Usaha Kotor	Rp xxx	
Rpxxx		
BEBAN OPERASI		
Beban Usaha	(xxx)	
(xxx)		
Sisa Hasil Usaha Keperasi	Rp xxx	
Rpxxx		
Beban Perkoperasian	(xxx)	
(xxx)		
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	Rp xxx	
Rp xxx		
Pendapaum dan Beban Lain-Lain	(xxx)	
(xxx)		
Sisa Hasil Usaba sebelum Pos-Pes Luar Biasa	Rp xxx	
Rp xxx		
Pendapatam dan beban Luar.Biasa	(xxx)	
(xxx)		
Sisa Hnsil Usaha Sebelum Pajak	Rp xxx	
Rp xxx		
Pajak Pengbasilan	(xxx)	
(xxx)		
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	<u>Rp xxx</u>	
Rp xxx		

Sumber : PSAK No 27

F. Penyajian Laporan arus Kas Koperasi

Laporan arus kas menyediakan informasi laporan tentang arus kas suatu badan usaha berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut

Laporan arus kas menyediakan informasi perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

Laporan arus kas akan membantu pada pemakainya untuk:

1. Menilai kemampuan perusahaan untuk memasuldmn kas dimasa yang akan datang.
2. Menilai alasan-alasan antara laba bersih dikaitkan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
3. Menilai pengaruh investasi, baik kas maupun bukan kas dan transaksi keuangan lainnya terhadap posisi keuangan selama satu periode tertentu.

Arus kas diklasifikasikan berdasarkan arus kas menurut aktivitas koperasi aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman pemeliharaan kemampuan perusahaan, membayar deviden dan melakukan operasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar.

Menurut **Niswonger (1999 : 46)** didalam melakukan laporan arus kas dari aktivitas operasi dapat menggunakan salah satu metode berikut:

1. Metode langsung

Arus kas bersih dari aktivitas perusahaan dihitung dengan menambahkan masing-masing arus kas masuk (dari pelanggan, bunga dan dividen atas investasi dan dana yang dideembalikan kepada pemasok) dan kemudian mengurangi masing-masing arus kas keluar (pembelian barang untuk dijual kembali, bunga atas hutang, pajak penghasilan, serta gaji dan upah)

2. Metode tidak langsung

Diawali dengan laba bersih dan menambahkan kembali beban yang tidak melibatkan pembayaran kas. I-Ial yang lebih penting adalah beban non kas tersebut meliputi beban penyusutan dan omortisasi.

Sedangkan dalam pelaperan ams kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, pemsahann hams melaporkan seeara terpisah kelompok utama dari penerimaan bmt0 dan pengeluaran bmt0 yang berasal dari aktivitas Investasi dan pendanaan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan eentoh laporan arus kas yang disusun berpedoman kepada PSAK No. 27 yang dapat dilihat pada tabel II. 3 dan tabel II. 4

Tabel II.3
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN ARUS KAS (Metode Langsung)
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2008

Arus Kas dari Aktivitas Operssi		
Penerimaan kas dari pelanggan	xxxxxxx	
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(xxxxxx)	
Kas yang dihasilkan operasi	xxxxxxx	
Pembayamn bunga	(xxxxxxx)	
Pembayaran pajak penghasilan	xxxxxxx	
Arus kas sebelum pos Iuar biasa		
Hasil dari asumnsi karena gempa bumi	(xxxxxxx)	xxxxxxx
Arus kas bersih dari aktivitas opemsi	xxxxxxx	
Arus Kas dad Aktivitas Investasi	<u>xxxxxxx</u>	
Perolehan anak perusahaan X dengan kas		
Pembelian tanah, bangunan dan peralman	(xxxxxxx)	
Hasil penjualan perulamn	(xxxxxxx)	
Penerimaan bunga	xxxxxxx	
' Penerimaan deviden	xxxxxxx	xxxxxxx
- Arus kas yang digunakan untuk investasi	<u>xxxxxxx</u>	
Arus Kas dad Aktivltas Pendanaan		
Hasil dari penerbitun modal saham		
Hasil dari pinjamanjangka panjang	xxxxxxx	
. Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan	xxxxxxx	
Pembayaran deviden*	(xxxxxxx)	<u>xxxxxxx</u>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>xxxxxxx</u>	xxxxxxx
Kenaikan bersih kas dan setara kas		xxxxxxx
Kas dan setara kas pada awal perlude		
Kas dan setara kas pada akhir periode		

* Dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi

TABEL II.4
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN ARUS KAS (Metode Tidak Langsung)
Periode yang Berakhir 31 Desember 2000

Laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa	xxxxx	
Penyesuaian untuk		
Penyusutan	xxxxx	
Kerugian	xxxxx	
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	xxxxx	
Kenaikan piutang dagang dan piutang lain	(xxxxx)	
Penurunan persediaan	xxxxx	
Penurunan hutang dagang	<u>(xxxxx)</u>	
Kas dihasilkan dari operasi		
Pembayaran bunga	xxxxx	
Pembayaran pajak penghasilan	(xxxxx)	
Arus kas sebelum pos luar biasa	(xxxxx)	
Hasil dari penyelesaian asuransi gempa bumi	xxxxx	
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	(xxxxx)	
Arus kas dari aktivitas investasi		
Perolehan perusahaan X dengan kas	(xxxxx)	
Pembelian tanah dan bangunan dan peralatan	xxxxx	
Hasil penjualan peralatan	xxxxx	
Penerimaan bunga	<u>xxxxx</u>	
Penerimaan deviden	xxxxx	<u>Xxxxx</u>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	xxxxx	
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Hasil dari penerbitan modal saham	(xxxxx)	
Hasil dari pinjaman jangka panjang	(xxxxx)	
Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan		
Pembayaran deviden*		xxxxx
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		xxxxx
Kenaikan bersih kas dan setara kas		
Kas dan setara kas pada awal periode		

G. Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota Koperasi.

Karakteristik pelaporan laporan promosi ekonomi anggota menurut IAI (PSAK NO. 27, 2007 : 27.9 - 27.10) adalah sebagai berikut:

1. Dalam sisa hasil usaha tahun berjalan yang belum dibagi, maka manfaat ekonomi anggota yang diperoleh anggota dari pembagian sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dapat diestimasi sebesar taksiran jumlah sisa hasil usaha yang akan dibagi untuk anggota.
2. Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi anggota yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu.
Laporan tersebut mencakup empat unsur yaitu:
 - a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
 - b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengelolaan bersama.
 - c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
 - d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.
3. Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya.
4. Sisa hasil usaha tahun berjalan harus dibagi sesuai dengan ketentuan anggaran dan anggaran rumah tangga koperasi. Bagian sisa hasil usaha untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. Dalam hal pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan belum dibagi karena tidak dapat secara tegas pembagiannya dalam anggaran rumah tangga dan harus menunggu keputusan rapat anggota, maka manfaat ekonomi yang diterima dari pembagian sisa hasil usaha dapat diestimasi atas dasar taksiran jumlah bagian sisa hasil usaha yang akan diterima oleh anggota.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, maka disajikan contoh laporan promosi ekonomi anggota yang disusun berpedoman kepada PSAK No.27 yang dapat dilihat pada tabel II.5

Tabel II.5
KOPERASI PEMBANGUNAN RAKYAT
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20XI dan 20X0

	20X1	
PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA:		
-Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	Rp. xxxxxx	Rp. xxxxxx
-Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pemasaran Produk Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA:		
-Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx
-Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan barang Untuk anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>xxxxxx</u> <u>Rp xxxxxx</u>
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI:		
-Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp. xxxxxx	Rp. xxxxxx
-Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	(xxxxxx)	(xxxxxx)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan Jasa untuk Anggota	xxxxxx	xxxxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>Rp xxxxxx</u>
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan untuk Anggota	<u>Rp xxxxxx</u>	<u>xxxxxx</u>
Jumlah Promosi ekonomi anggota	Rp xxxxxx	Rp xxxxxx

H. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan Koperasi.

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian terpadu dari penyajian laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan digunakan dalam memberikan tambahan informasi mengenai pos-pos neraca dan perhitungan sisa hasil usaha.

Dalam **PSAK No. 27 (2007 : 27.10)** catatan atas laporan keuangan pada koperasi menyajikan pengungkapan yang memuat:

1. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai :
 - a. Pengungkapan pendapatan dan beban sehubungan transaksi koperasi dengan anggota dan non anggota.
 - b. Kebijakan akuntansi mengenai aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.
 - c. Dasar penetapan harga layanan kepada anggota dan non anggota.
2. Pengungkapan informasi antara lain mengenai :
 - a. Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran rumah tangga maupun dalam praktek atau telah dicapai oleh koperasi.
 - b. Aktivitas manusia dan mempromosikan usaha manajemen koperasi dalam pembangunan sumber daya diselenggarakan untuk anggota dan peneptaan lapangan baru bagi anggota,
 - c. Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dari transaksi dengan anggota dan non anggota.
 - d. Mengklasifikasikan hutang dan piutang yang timbul dari anggota dan non anggota
 - e. pembatasan penggunaan resiko atas asset tetap yang diperoleh atas dasar atau sumbangan.
{ Aset yang dioperasikan oleh koperasi tapi bukan milik koperasi.
 - g. Aset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
 - h. Penghasilan sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
 - i. Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan
 - j. Menyelenggarakan rapat anggota dan keputusan - keputusan yang dipengaruhi terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan menjelaskan yang berkaitan dengan laporan keuangan.

Juga mengenai kebijaksanaan koperasi atas dasar metode-metode yang digunakan perolehan assets, pembagian sisa hasil usaha dan lainnya.

J. Koperasi Dalam Islam

Koperasi disebut pula dengan *Syirkah Ta'awuniyah* (perseroan tolong menolong), terlepas apakah koperasi sudah dibahas atau pernah disinggung-singgung oleh para ulama yang membahas tentang syirkah maupun tidak. Dikaji dari segi defenisinya, koperasi merupakan perkumpulan sekelompok orang dalam rangka pemenuhan kebutuhan anggotanya, bila ada keuntungan dan kerugian dibagi rata sesuai dengan besarnya modal yang ditanam, meskipun menurut Mahmud Syaltut bahwa dalam *Syirkah Ta'awuniyah* tidak ada unsur *Mudharabah*, tapi pada intinya Syaltut mengakui bahwa didalam terdapat pembagian untung dan pembagian kerugian.

Persekutuan adalah salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan dalam syara', karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan dan dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara', didalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 2 Allah SWT, berfirman yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة : ٢]

Yang artinya :

“ dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan “

Berdasarkan pada ayat Al-Qur'an diatas kiranya dapat dipahami bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan dalam ketaqwaan dianjurkan oleh Allah, maka koperasi sebagai salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan, menutupi kebutuhan dan saling tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna (*baqa tuqatih*),

Didalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Annas bin Malik RA. Berkata Rosullullah SAW bersabda yang berbunyi :

أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَصْرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا، قَالَ تَحْجُرُهُ وَتَمْنَعُهُ
مَنْ أَظْلَمَ فَذَلِكَ نَصْرُهُ

“ tolonglah saudaramu yang menganiaya dan aniaya dan yang dianiaya, sahabat bertanya : ya Rosulllah aku aku dapat menolong orang yang dianiaya, tapi bagaimana menolong orang yang menganiaya? Rosul menjawab: kamu tahan dan mencegahnya dari menganiaya itulah arti menolong dari padanya” .

Hadist tersebut dapat dipahami lebih jauh (luas), maka dapat dipahami bahwa Umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara berkooperasi dan menolong orang-orang kaya jangan sampai mengisab darah orang-orang miskin, dengan cara mempermainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan dengan cara yang lain-lainnya

BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI

A. Sejarah singkat koperasi.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia guru-guru kecamatan Rambah(KPRI "GKR") berdiri pada tahun 1970 dengan nama Badan kesejahteraan guru(BAKESRU) yang meliputi wilayah Tambusai, Kepenuhan, dan Rambah.

Diprakarsai 6 orang pendiri diantaranya adalah :

1. Muhammad Dasa. (Alm)
2. Muhammad Lama (Alm)
3. Muhammad Yakup (Alm)
4. Jazaika (Alm)
5. Tengku M. Rasyid (Alm)
6. H. Abu Bakar D.S (Alm)

Dengan anggota baru sekitar 260 orang, pada tahun 1977 Bakesru mengalami kebangkrutan, tetapi pada tahun 1979 didirikan lagi oleh bapak A.Ahmad Noor dengan unit usaha Simpan pinjam dan kedai.

Pada tahun 1982 Bakesru diganti dengan nama Koperasi "GKR" dengan badan hukum 1119/BH/XII/1982. tetapi pada tanggal 11 Mei Tahun 1996 badan hukum koperasi dirubah dengan Badan hukum 228/BI-1/PAD/KWK-4/5.1N/1996. dengan nama baru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "GKR"(KPRI "GKR") dengan jumlah anggota tetap sampai tahun 2008 adalah 663 anggota, yang berkedudukan di jalan diponegoro Simpang Tugu Pasir Pengaraian Rambah Rokan I-Iulu, dengan unit usaha simpan pinjam dan waserda.

Untuk mendukung rencana usaha modal disetor dikumpulkan dari para anggota pemula sebanyak 260 orang yang terdiri dari simpanan pokok sebesar Rp 5.000 simpanan wajib Rp 10.000 per bulan. Dan pada tahun 1996 telah terjadi perubahan anggaran dasar simpanan pokok anggota ditambah menjadi Rp 25.000 simpanan wajib menjadi Rp 30.000 per anggota/bulan. Kemudian anggota koperasi ini berkembang menjadi 663 anggota.

Koperasi adalah badan usaha yang paling sesuai dengan isi dan makna Undang-undang dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang memiliki sikap serta kepedulian yang tinggi terhadap sendi kehidupan perekonomian rakyat baik dari aspek sosial maupun usahanya. Sehingga disaat-saat perekonomian Indonesia dilanda krisis maka sektor koperasi masih bisa bertahan dan menjalankan roda perekonomian untuk memberikan andil kepada masyarakat. Oleh sebab itu KPRI "GKR" terus berkegiatan untuk senantiasa meningkatkan kepedulian yaitu dengan meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan anggota hingga mampu menjadi sosok yang mandiri, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Struktur Organisasi.

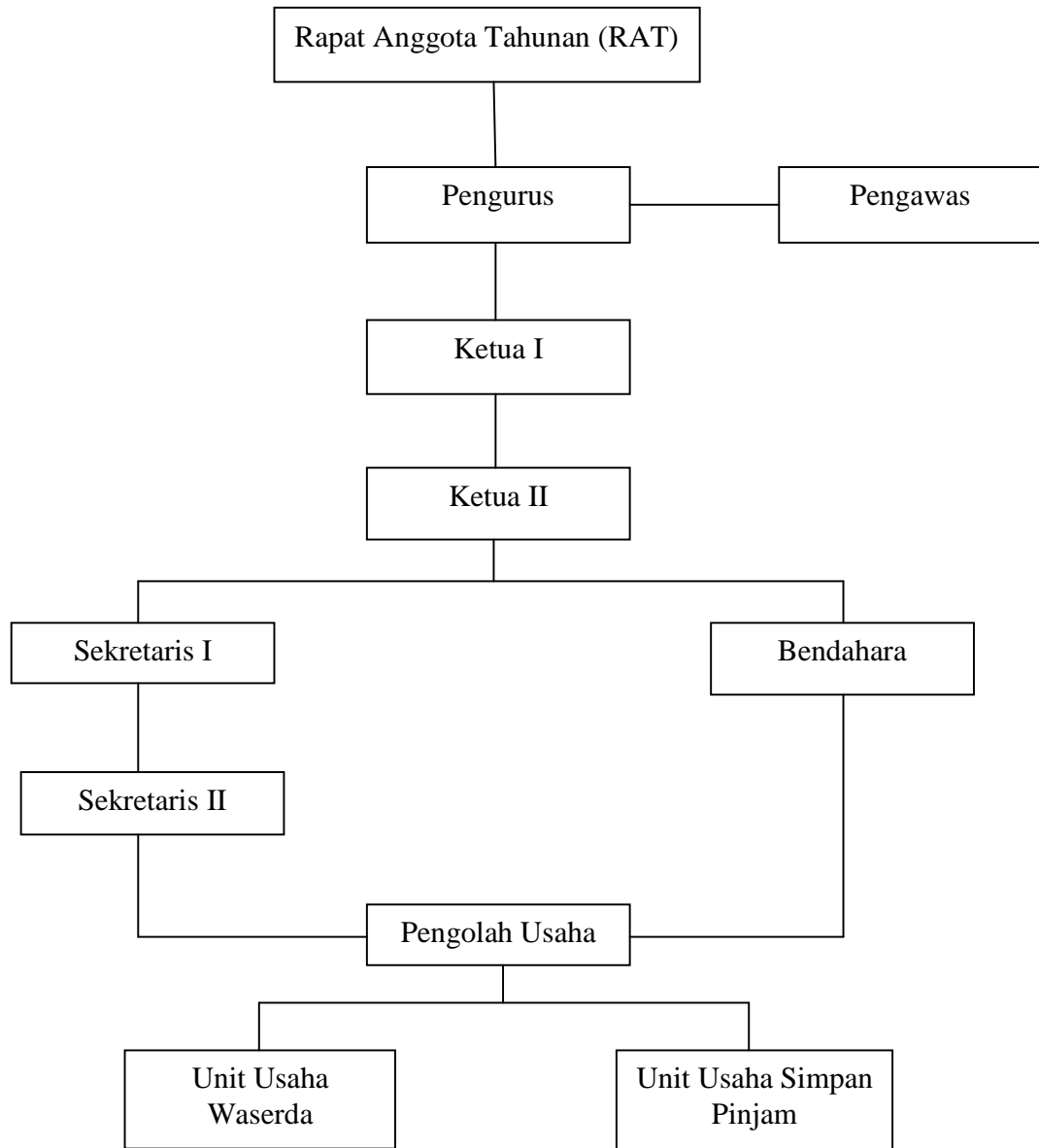
Struktur organisasi merupakan kerangka atau bagian yang berisikan penggarisan atau penerapan dari tugas, tanggung jawab dan wewenang atas setiap fungsi yang harus dijalankan oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi tersebut. Dari struktur organisasi dapat terlihat pembagian dan pendistribusian tugas dari atau untuk setiap orang yang ada di dalamnya secara tegas dan jelas. Sehingga administrasi dan manajemen mempunyai peran dominan di dalam organisasi tersebut.

Struktur organisasi koperasi disusun berdasarkan UU No. 25 tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian yang menyatakan bahwa alat kelengkapan koperasi terdiri dari: (1) Rapat anggota, merupakan badan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. (2)

Pengunns, merupakan badan yang menjalankan keputusan rapat anggota. (3) Badan pemeriksa dan pengawas, merupakan badan yang mengawasi jalannya kegiatan koperasi.

Selanjutnya berdasarkan perkembangan usaha koperasi, pengurus dapat mempekeijakan kaiyawan untuk menjalankan aktivitas usaha sehari-hari. Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru-guru Keeamatan Rambah (KPR1"GKR") telah membentuk dan mempunyai kelengkapan struktur organisasi sesuai dengan UU No. 25 tahun 1992 tentang perkeperasian. Untuk mendapatkangambaran lebih jelas berikut penulis sajikan tentang suuktur organisasinya.

Gambar III.1
STRUKTUR ORGANISASI KPRI “GKR”
KEC. RAMBAH KAB. ROKAN HULU



Sumber: Buku RAT Anggota Tahunan KPRI “GKR” Tahun 2008

Tugas dan wewenang pengurus koperasi berdasarkan struktur yang ada adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi, yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan kegiatan koperasi. Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar, dalam rapat anggota ditentukan kebijakan tugas-tugasnya dalam organisasi tersebut.

2. Pengurus.

Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota dan melaksanakan kebijaksanaan umum serta mengelola organisasi dan usaha koperasi, sebagaimana telah ditetapkan oleh rapat anggota.

Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usaha kepada rapat anggota, Ketua KPRI "GKR" memiliki bawahan yang terdiri dari wakil ketua, bendahara, sekretaris dan wakil sekretaris

a. Ketua

Memiliki tugas antara lain:

1. Menyusun program kerja bersama pengurus lainnya.
2. Membuat rencana rapat kerja dan rencana anggaran belanja.
3. Memimpin rapat anggota tahunan dan rapat anggota lainnya.

b. Sekretaris.

Mempunyai tugas:

1. Mengelola simpanan pinjaman anggota.
2. Menyalurkan dana bagi peminjam

3. Melakukan pengawasan terhadap unit usaha yang temtama reneana pengembangannya.

e. Bendahara.

Mempunyai tugas:

1. Membuat laporan harian kas.
2. Membuat penerimaan dan pengeluaran kas.
3. melakukan pemberdayaan kepada pihak ketiga.

3. Pengawas.

Pengawas dipilih dari anggota dan oleh anggota dalam rapat anggeta danbertanggung jawab langsung kepada mpat anggota. Badan pengawas mempunyai tugas:

- a. Menilai hasil kerja dengan reneana yang sudah ditetapkan.
- c. Meneegah tujadinya penyelewengan.
- d. Keberesan administrasi soeam menyeluruh.

C. Aktivitas Usaha KPRI “GKR”

Melaksanakan akdvitas operasi merupakan dasar didirikannya koperasi.Tujuan dari aktivitas koperasi tersebut adalah nmtuk memperoleh manfaat ekonomi yang layak dan. Memberikan bimbingan kepada pengurus, karyawan, kearah keahlian dan keterampilan. mensejahterakan anggotanya. Dalam hal ini bidang usaha yang dipilih haruslah benar-benar memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan manfaat bagi koperasi untuk melanjutkan usahanya.

Aktivitas mama KPRI "GKR" adalah bidang usaha waserda dan unit simpan pinjam.

a. Waserda Dalam (warung serba ada)

Hal ini KPRI "GKR" Rambah menyediakan bahan-bahan kebutuhan bagi masyarakat yang ada di keamatan Rambah dan sekitanya.

b. Simpan Pinjam

Unit usaha ini hanya dipenmtukkan bagi anggota KPRI "GKR" Rambah. Memberikan pinjaman kepada anggota dengan bungn yang layak dan prosedur yang mudah, dengan pinjaman ini diharapkan dapat menambah partisipasi anggota terhadap keperasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari telaah pustaka yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan analisa dan penilaian terhadap penerapan PSAK No. 27 pada KPRI "GKR" Rambah.

A. Penilaian dan Penyajian Laporan Neraca.

Neraca KPRI " GKR " Rambah disajikan secara komparatif antara tahun buku 2007 dan 2008, disusun dalam bentuk skontro atau T account, Dimana semua pos aktiva disajikan disebelah kiri dan pos kewajiban dan modal disebelah kanan. Bentuk ini merupakan bentuk umum dan telah sesuai dengan PSAK No.27, Penyajian secara komparatif ini dapat lebih membantu para pemakai laporan keuangan untuk melihat perkembangan KPRI " GKR " Rambah tahun sekarang dan tahun sebelumnya.

Aktiva (Asset).

Penyajian neraca KPRI "GKR" telah mencantumkan aktiva, kewajiban dan kekayaan bersih perusahaan pada tanggal neraca. Unsur aktiva terdiri dari aktiva lancar, investasi jangka panjang dan aktiva tetap.

Aktiva lancar disajikan berdasarkan likuiditasnya. Kas adalah aktiva lancar yang paling likuid, seterusnya bank, piutang, penyisihan piutang, persediaan, mini market, pendapatan yang masih harus diterima. Penilaian kas yang dicantumkan dalam neraca merupakan jumlah kas yang dapat digunakan. sewaktu-waktu dan tidak terikat wewenang penggunaannya. Oleh karena tidak ada pembatasan tersebut maka semua kas tersebut dapat dilaporkan dalam perkiraan kas. Sesuai dengan sifat kas yang paling likuid, kas

telah disajikan pada urutan paling atas dari aktiva lancar. Namun demikian dalam hal penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa kesalahan, diantaranya sebagai berikut:

Piutang.

Penyajian piutang dineraca KPRI "GKR" tahun 2008 dan 2007 dilaporkan dalam satu perkiraan yaitu piutang. Penyajian piutang dineraca terdiri dari:

Tahun 2008	1. Piutang Khusus	Rp 27.716.200
	2. Piutang Simpan pinjam	Rp 1.099.482.087
	3. Piutang Waserda	Rp. 288.045.012
.	4. Piutang Lebaran	<u>Rp 38.401.000</u>
	Total piutang	Rp. 1.453.644.299

Tahun 2007	1. Piutang Khusus	Rp. 20.797.700
	2. Piutang Simpan pinjam	Rp. 1.032.502.979
	3. Piutang Waserda	Rp. 248.774.669
	4. Piutang Lebaran	<u>Rp. 56.621.000</u>
	Total Piutang	Rp 1.358.696.34

Dari hasil wawancara penulis dengan pengurus koperasi dan dari daftar piutang KPRI "GKR" Rambah (terlampir) diperoleh informasi bahwa jumlah piutang sebesar Rp 1.453.644.299 untuk tahun 2008, dan piutang sebesar Rp 1.358.696.345 untuk tahun 2007, merupakan piutang anggota koperasi. KPRI "GKR" tidak melakukan pelayauan piutang

kepada non anggota koperasi sehingga di laporan neraca tidak perlu ada perkiraan untuk piutang non anggota.

Penyisihan piutang.

Pada laporan Nemea KPRI "GKR"Rambah menunjukdum bahwa pada perkiman piutang untuk tahun 2008 sebesar Rp. 1.453.644.299 dan untuk tahun 2007 sebesar Rp. 1.358.696.345, piutang pada koperasi mengalami peningkatan dengan kenakan piutang sebesar Rp 94.947.954 tetapi pada perkiraan penyisihan piutang tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 78.920.926 untuk tahun 2008 dan sebesar Rp. 78.920.926 untuk tahun 2007. Dengan demikian KPRI tidak membuat penyisihan piutang tak tertagih meskipun piutang mengalami peningkatan.

KPRI "GKR"Rambah tidak menggunakan metode yang konsisten terhadap piutang tak tertagih, jika untuk menghitung penyisihan piutang tak tertagih pada tahun 2008 diasumsikan menggunakan pendekatan L/R berdasarkan presentase penjualan maka dapat dihiung besarnya penyisihan piutang tak tertagih untuk koperasi, pendekatan yang dipakai sebelumnya oleh koperasi adalah hanya melihat dari piutang tak tertagih dari unit simpan pinjam dan waserda, koperasi tidak menggunakan pendekatan yang sesuai dengan teori akuntansi, sehingga penyisihan piutang tak tertagih tersebut tidak konsisten.

Dari laporan PHU KPRI "GKR"Rambah mempunyai saldo akhir penjualan sebesar Rp. 187.690.750, saldo eadangan kerugian penyisihan piutang sebesar Rp. 78.920.926, persentase kerugian piutang ditetapkan KPRI "GKR"Rambah sebesar 4 % dari penjualan, Berikut ini penulis menghitung penyisihan piutang tak tertagih KPRI "GKR"Rambah dengan menggunakan metode penjualan.

Presentase kerugian 4 % x Rp 187690.750 :

Rp 7.507.630

Saldo eadangan kerugian penyisihan piutang : Rp 78.920.926

Jumlah cadangnn kerugian penyisihan piutang di Neraea : Rp 86.428.556

Dan jumal yang harus dibuat KPRI "GKR"Rambah adalah :

Beban piutang tak tertagih Rp. 7.507.630

Penyisihan piutang tak tertagih Rp. 7.507.630

Dari perhitungan di atas dapat diketnhui bahwa jumlah penyisihan piutang untuk tahun 2008 menjadi sebesar Rp. 86.428556, dan untuk tahun 2007 sebesar Rp. 78920.926, untuk perkiraan beban piutang tak tenagih dilaporkan pada perhitungan sisa basil usaha sebagai beban usaba sebesar Rp 7.507.630 dan untuk perkiraan penyisihan piutang tak tenagih dilaporkan di neraea menjadi Rp.86.428556.

Adapun pengaruh tidak dibuamya penyisihau piutang tak tertagih pada KPR1 "GKR"Rambah adalah beban usaha pada perhitungan hasil usaha dieatat terlalu rendah sehingga SHU yang dihasilkan terlalu tingggi, akibat dari kesalahan ini laporan keuangnn yang disajikan oleh kopemsi tidak dapat memberikan informasi yang beuar dan menyesatkan pengguna Iaporan keuangan itu sendiri. Menurut pengurus kepemsi kesalahan ini terjndi karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengurus koperasi dalam menyusun laperan keuangannya. Dengan demikian pengzuuhnya terhadap SHU adalah SHU untuk tahun 2008 menjadi Rp. 340.302.024,34 (Rp 347.809.654,34 — Rp. 7.507.630).

Aktiva tetap

Aktiva tetap KPR1 "GKR" Rambah terdiri dari :

Tahun 2008	1. Tanah	Rp. 23.625.000
.	2. Bangunan	Rp. 261.850.000

	3. Mesin	Rp. 14.598.200
	4. Peralatan usaha	Rp. 20.957.400
	5. Peralatan kantor	<u>Rp. 23.586.300</u>
	Total aktiva tetap	Rp. 344.616.900
Tahun 2007	1. Tanah	Rp. 23.625.000
	2. Bangunan	Rp. 261.850.000
	3. Mesin	Rp. 14.598.200
	4. Peralatan usaha	Rp. 9.897.900
	5. Peralatan kantor	<u>Rp. 21.636.300</u>
	Total aktiva tetap	Rp. 331.607.400

Dalam penyajian laporan neraca KPRI "GKR" Rambah aktiva tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*) Tetapi penempatan perkiraan akumulasi penyusutan aktiva tetap tersebut disajikan terpisah dengan nilai netto yang tidak sesuai dengan PSAK No. 27.

Sesuai dengan PSAK No. 27 nilai buku dari aktiva tetap harus dicantumkan di neraca dan disertai dengan akumulasi penyusutan aktiva tersebut pada tahun yang bersangkutan dan tidak disajikan terpisah dengan nilai netto. Sehingga pengguna atau pembaca laporan keuangan dengan mudah membaca laporan keuangan tersebut sehingga dapat memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan itu sendiri.

Dari hasil wawancara penulis dengan pengurus koperasi kesalahan ini terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengurus koperasi dalam

menyusun laporan keuangannya. Adapun daftar aktiva tetap dan nilai penyusutan untuk tahun 2008 dan tahun 2007 (terlampir).

Kewajiban.

Dalam kelompok KPRI "GKR"Rambah telah memisahkan antara kewajiban lancar (jangka pendek) dan kewajiban jangka panjang, hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 27 urutan kewajiban yang dicantumkan pada neraca dikelompokkan dalam bagian kewajiban jangka pendek dan jangka panjang berdasarkan jangka waktu pelunasannya.

Kewajiban lancar yang dicantumkan pada akhir periode neraca KPRI "GKR"Rambah tahun 2008 terdiri atas:

1. Biaya YMH dibayar	Rp. 50.000.000
2. Titipan	-
3. Hutang Dana-Dana	Rp. 93.383.275
4. Pendapatan yang ditangguhkan	Rp. 24.494.727
5. Dana resiko	Rp. 50.263.000
6. SHU anggota	Rp. 30.237.329
7. Simpanan sukarela	Rp. 517.065.461
8. Dana PKPN	Rp. 10.179.781

Dalam hal penyajian kewajiban neraca tahun 2008, diketahui bahwa koperasi belum menggabungkan perkiraan untuk simpanan sukarela dan SHU bagian anggota, menurut PSAK No. 27 bahwa hutang yang berasal dari anggota hanya dibuat satu perkiraan menjadi hutang simpanan anggota. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pembaca laporan keuangan dan mempermudah pengurus koperasi dalam menyusun laporan keuangannya.

Dari perkiraan kewajiban diatas, kewajiban yang dapat dikelompokkan dalam satu perkiraan menjadi hutang simpanan anggota diantaranya adalah :

Tahun 2008	I. Simpanan sukarela	Rp. 517.065.461
	2. SHU bagian anggota	<u>Rp. 30.237.329</u>
	Total hutang simpanan anggota	Rp. 547.302.790

Tahun 2007	1. Simpanan Sukarela	Rp. 508.593.950
	2. SHU bagian anggota	<u>Rp. 22.995.870</u>
	Total hutang simpanan anggota	Rp. 531.589.820

Dalam kelompok kewajiban KPRI "GKR"Rambah tidak mengklasifikasi kewajiban jangka panjang karena kewajiban jangka panjang tersebut memang tidak terdapat pada KPR1 "GKR"Rambah Kekayaan bersih (ekuitas) Ekuitas yang merupakan hak dari anggota koperasi dinilai berdasarkan jumlah setoran dari anggota. Penyajian ekuitas terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, donasi, cadangan, SHU tahun 2007 dan SHU tahun berjalan. Sedangkan simpanan lain yang tidak berkarakteristik sebagai modal disajikan sebagai kewajiban lancar jika jangka waktu pengambilannya kurang dari satu tahun dan sebagai kewajiban jangka panjang jika lebih dari satu tahun.

Kekayaan bersih KPRI "GKR"Rambah terdiri atas :

Tahun 2008	1. Simpanan pokok	Rp. 16.531.000
	2. Simpanan wajib	Rp. 226.900.785
	3. Simpanan wajib Khusus	-

	4. Donasi	Rp. 500.000
	5. Eadangan	Rp. 723.132834
	6. SHU tahun 2007	Rp. 79.360.470
	7. SHU tahun berjalan	<u>Rp. 340.302.024,34</u>
	Total keknyun bersih	Rp. 1.386.727.113,34
Tahun 2007	1. Simpanan pokok	Rp. 16.606.000
	2. Simpanan Wajah	Rp. 205.641.48S
	3. Simpanan wajib khusus	-
	4. Donasi	Rp. 500.000
	5. cadangan	Rp. 723.132.834
	6, SHU tahun 2007	-
	7. SHU tahun berjalan	<u>Rp. 79.360.470</u>
	Total kekayaan bersih	Rp. 1.025.240.789

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, berikut penulis sajikan neraca yang disusun dengan berpedoman pasa PSAK No. 27 untuk tahun 2008 dan 2007 pada tabel IV. 1

Tabel IV.1
KPRI GURU-GURU KECAMATAN RAMBAH
NERACA
PER 31 DESEMBER 2008

Aktiva	2008	2007	Kewajiban dan kekayaan Bersih	2008	2007
Aktiva lancar	Rp	Rp	Kewajiban Lancar	Rp	Rp
Kas	141.128.100	149.259.770	Biaya YMH dibayar	50.000.000	35.000.000
Bank	29.770.609,57	-	Titipan	-	-
Piutang anggota	1.453.644,299 (86.428.556)	1.358.696.345 (78.920.926)	hutang dana-dana	93.383.275	113.413.275
Penyisihan	-	-	Pendapatanyang ditangguhkan	24.494.72	14.964.727
Piutang	305.752.244,84	105.582.968	Dana resiko	50.263.000	47.945.000
Persediaan	<u>78.957.055</u>	=	Hutang simpanan anggota	547.302.790,91	531.589.820
Mini Market	<u>1.922.823.751,25</u>	<u>1.534.620.157</u>	Dana PKPN	<u>10.179.781</u>	<u>9.795.581</u>
Pendapatan	-	-	Jumlah Kewajiban Lancar	<u>775.623.573,91</u>	<u>752.708.403</u>
YMH diterima	<u>753.700</u>	<u>753.700</u>	Kewajiban Jangka panjang		
Jumlah	<u>753.7000</u>	<u>753.700</u>	Jumlahkewajibanjangkapanjang	=	=
Aktiva Lancar			Kekayaan bersih		
Investas	23.625.000	23.625.000	Simpanan pokok	16.531.000	_16.606.000
Penyertaan	261.850.000	261.850.000	Simpanan wajib	226.900.785	205.641.485
Pada PKPN	<u>(57.845.000)</u>	<u>(44.752.500)</u>	Simpanan wajib khusus	-	-
Jumlah	204.005.000	217.097.500	Donasi	500.000	500.000
Penyertaan	14.598.200	14.598.200	Cadangan	723.132.834	723.132.834
Aktiva Tetap	<u>(14.019.996)</u>	<u>(13.937.396)</u>	SHU Tahun 2007	79.360.470	-
Tanah	578.204	660.804	SHU Tahun berjalan	<u>340.302.024,34</u>	<u>79.360.470</u>
Bangunan	20.957.400	9.897.900	Jumlah kekayaan bersih	<u>1.386.727.113,34</u>	<u>1.025.240.789</u>
Akm. Peny	<u>(11.427.390)</u>	<u>(9.881.890)</u>			
Bangunan	9.530.010	16.100			
	23.586.300	21.636.300			
Mesin	<u>(22.551.279)</u>	<u>(20.460.279)</u>			
Akm Peny	238.773.235	242.575.335			
Mesin					
Peralatan Usah					
Akm. Peny					
peralatan					
Usaha					
Peralatan					
kantor					
Akm peny.					
Peralatan					
kantor					
Jumlah aktiva					
Tetap					
Total aktiva	2.162.350.686	1.777.949.192	Total kewajiban dakekayaan	2.162.350.686,25	1.777.949.192

B. Penilaian dan Penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha.

Sesuai dengan unsur yang mempengaruhi hasil usaha yaitu pendapatan dan beban, maka penilaian hasil usaha berkaitan dengan kedua akun tersebut. Perhitungan hasil usaha KPR1 "GKR" Rambal1 disajikan secara komparatif sebagaimana ditentukan dalam PSAK No. 27.

Perhitungan hasil usaha bertujuan untuk menentukan sisa hasil usaha yang diperoleh selama satu periode, dengan membandingkan antara pendapatan yang diperoleh selama satu periode dengan beban yang dikeluarkan selama satu periode. Istilah perhitungan hasil usaha sebagai pengganti istilah laporan Rugi/Laba modal jenis usaha koperasi. Mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari laba, tetapi lebih ditekankan pada manfaat untuk anggota. Oleh karena itu koperasi tidak menggunakan istilah Rugi/Laba melainkan hasil usaha.

Dari laporan perhitungan hasil usaha tahun 2008 dan 2007 (terlampir) pendapatan dan beban KPR1 "GKR" Rambal1 berasal dari :

Pendapatan berasal dari penjualan barang dagangan.

Tahun 2008:	Penjualan barang dagangan waserda	Rp. 187.690.750
	Beban pokok	(Rp. 148.420.000)
	SHU kotor atas penjualan	Rp. 39.270.750

Pendapatan yang berasal dari jasa kepada anggota.

Tahun 2008:	Pendapatan jasa simpan pinjam	Rp. 124.173.250
-------------	-------------------------------	-----------------

Pendapatan berasal dari pendapatan lain-lain.

Tahun 2008:	SHU swamitra 2006 s/d 2008	Rp. 69.957.054,84
	Fee dari mini market	Rp. 200.167.276,84

Bunga Rek tabungan	Rp. 1.497.582,57
Sewa toko	<u>Rp. 13.000.000</u>
Total pendapatan lain-lain	Rp 284.621.914,25

Beban usaha koperasi meliputi :

Tahun 2008:	1. Gaji karyawan	Rp. 21.050.000
	2. Gaji kolektor	Rp. 3.840.000
	3. Gaji petugas Adm	Rp. 2.400.000
	4. Gaji KA. Unit SP	<u>Rp. 3.600.000</u>
	Total beban usaha	Rp. 30.890.000

Beban umum koperasi meliputi :

Tahun 2008:	1. Gaji pengurus	Rp. 18.000.000
	2. Beban perawatan kantor	Rp. 3.250.000
	3. Beban pemeliharaan inventaris	Rp. 1.200.000
	4. Beban Rapat	Rp. 2.300.000
	5. Beban air, listrik, telepon	Rp. 2.077.465
	6. Beban transportasi	Rp. 1.750.000
	7. Beban konsumsi	Rp. 2.200.000
	8. Beban pajak PBB	Rp. 372.500
	9. Beban peny. Inventaris	Rp. 15.282.100
	10. Beban RAT	Rp. 18.767.000
	11. Beban ATK	Rp. 3.267.170
	12. Beban kelancaran usaha	Rp. 900.000
	13. Beban pembulatan kas	Rp. 24,91

14. Beban Piutang Tak Tenagih	<u>Rp. 7.507.630</u>
Total beban umum	Rp. 76.8'73.889,91
<u>Pendapatan berasal dari penjualan barang dagangan.</u>	
Tahun 2007 : Penjualan barang dagangan waserda	Rp. 169.485.000
Beban pokok	<u>(Rp. 136230.000)</u>
SHU kotor atas penjualan	Rp. 33.255.000
<u>Pendapatan berasal dari pendapatan jasa.</u>	
Tahun 2007: Pendapatanjasa SP	Rp. 126.613.425
<u>Pendapatan berasal dari pendapatan lain-lain.</u>	
Tahun 2007: SHU swamitra	Rp. 9.467.110
Sewa toko	<u>Rp. 13.000.000</u>
Total pendapatan lain-lain	Rp. 22.467.110
<u>Beban usaha koperasi meliputi :</u>	
Tahun 2007: 1. Gaji karyawan SP	Rp. 18.000.000
2. Gaji kelektor	Rp. 3.840.000
3. Gaji karyawan waserda	Rp. 8.360.000
4. Gaji pengelola	<u>Rp. 3.600.000</u>
Total beban usaha	Rp. 33.800.000
<u>Beban umum koperasi meliputi :</u>	
Tahun 2007: 1.Gaji pengurus	Rp. 20.400.000
. 2. Beban kamor	Rp. 2.222.300
3.Beban pemeliharaan inventaris	Rp. 1.000.000
4. Beban Rapat	Rp. 598.700

5. Beban air, listrik, telepon	Rp. 3.342.465
7. Beban peny. Inventaris	Rp. 18.349.600
8. Beban YMH dibayar	Rp. 10.000.000
9. Beban transportasi	Rp. 200.000
10. Beban peny. Peralatan	Rp. —
11. Beban peny. Piutang	Rp. 3.000.000
12. Beban YMH dibayar	<u>Rp. 5.000.000</u>
Total beban umum	Rp. 69.175.065

Dari perhitungan hasil usaha (terlampir) KPRI “GKR”Rambah tidak memisahkan pendapatan dan jasa dari anggota dan non anggota. Hal ini disebabkan karena koperasi tidak memisahkan tempat penjualannya antara anggota dan non anggota, dengan tidak dipisahkannya pendapatan dan jasa yang berasal dari anggota dan non anggota. Maka kopemsi tidak dapat melihat seberapa besar partisipasi anggota dalam memajukan koperasi. Disamping itu juga laporan perhitungan hasil usaha tidak dapat mencerminkan tujuan koperasi yang lebih mementingkan transaksi atau pelayanan kepada anggota.

Menurut PSAK No. 27 bahwa KPRI “GKR”Rambah harus memisahkan transaksi penjualan kepada anggota dan kepada non anggota dengan membuat pembukuan secara terpisah sehingga besarnya partisipasi anggota dalam memajukan koperasi dan kepentingan koperasi dalam melayani anggota dapat terlihat dengan jelas.

Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang partisipasi anggota dan kepentingan koperasi dalam melayani anggota, berikut penulis sajikan laporan

perhitungan hasil usaha yang berdasarkan pada PSAK No. 27 untuk tahun 2008 dan 2007 pada tabel IV. 2

Dari tabel IV.2 dapat dilihat besarnya partisipasi anggota koperasi terhadap sisa hasil usaha kotor untuk tahun 2008 adalah sebesar 75,97 persen dan untuk tahun 2007 adalah sebesar 79,20 persen. Besarnya presentase tersebut dapat dihitung sebagai berikut:

Tahun 2008 : $\frac{124.173.250}{163.444.000} \times 100 \% : 75,97 \%$

163.444.000

Tahun 2007: $\frac{126.613.425}{159.868.425} \times 100 \% : 79,20\%$

159.868.425

Tabel IV.2
KPRI GURU-GURU KECAMATAN RAMBAH
(KPRI “GKR”)

PERHITUNGAN HASIL USAHA

Untuk tahun yang berakhir 31 desember 2008 dan 2007

	2008	2007
	Rp.	Rp.
<u>Partisipasi Anggota</u>		
Partisipasi Bruto anggota	124.173.250	126.613.425
Beban Pokok	-	
Partisipasi netto anggota	124.173.250	126.613.425
<u>Pendapatan dari Non anggota</u>		
Penjualan	187.690.750	169.485.000
Harga Pokok	(148.420.000)	(136.230.000)
Laba Kotor Dengan Non Anggota	39.270.750	33.255.000
Sisa hasil usaha kotor	163.444.000	159.868.425
<u>Beban Operasi</u>		
Beban Usaha	(30.890.000)	(33.800.000)
Beban Administrasi Umum	(76.873.889,91)	(69.175.065)
SHU Operasi	56.680.110,1	56.893.360
<u>Pendapatan Dan Beban Lain-lain</u>		
Pendapatan lain-lain	284.621.914,25	22.467.110
Beban lain-lain	-	-
Selisih Pendapatan dan beban diluar operasi	284.621.914,25	22.467.110
SHU sebelum pajak	340.302.024,34	79.360.470
Pajak penghasilan		
SHU setelah pajak	340.302.024,34	79.360.470

C. Penilaian dan Penyajian Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi atas kas dan aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi dan atas kas dari aktivitas pendanaan.

Dalam laporan keuangannya KPRI "GKR" Rambah tidak meneantumkan laporan arus kas sebagai bagian dari laporan keuangan. Koperasi menganggap bahwa laporan keuangan yang utama adalah neraca dan perhitungan hasil usaha sedangkan arus kas hanya merupakan laporan tambahan yang diturunkan dari neraca dan perhitungan hasil usaha.

Dengan tidak dibuatnya laporan arus kas ini KPRI "GKR" Rambah tidak dapat menentukan dan menilai kemampuan koperasi dalam menghasilkan kas atau setara kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan usaha koperasi dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan sumber pendanaan luar.

Menurut penulis, sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab telaah pustaka yang diatur dalam PSAK No.27 laporan arus kas ini harus disajikan pada laporan keuangan koperasi karena laporan arus kas merupakan salah satu bagian laporan keuangan yang harus disajikan.

Oleh sebab itu berikut penulis sajikan laporan arus kas yang berpedoman pada PSAK No. 27 untuk tahun 2008 dan 2007 pada tabel IV. 3 berikut ini :

Tabel IV.3
 KPRI GURU-GURU KECAMATAN RAMBAH
 LAPORAN ARUS KAS
 Tahun Yang 31 Desember Berakhir 2008

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	Dalam rupiah	
Laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa		340.302.024,34
Laba operasi sebelum perubahab modal kerja	16.811.600	
Beban penyusutan	(29.770.609,57)	
Kenaikan bank	(94.947.954)	
Kenaikan piutang usaha	7.507.630	
Kenaikan peny. Piutang tak tertagih	(200.167.176,84)	
Kenaikan mini market	(78.957.055)	
Kenaikan pendapatan YMH diterima	15.000.000	
Kenaikan biaya YMH dibayar	(20.030.000)	
Penurunan hutang dana-dana	9.530.000	
Kenaikan pendapatan yang ditangguhkan	2.318.000	
Kenaikan dana resiko	7.241.459	
Kenaikan SHU anggota	8.471.511,9	
Kenaikan simpanan sukarela	<u>384.2000</u>	
Kenaikan dana PKPN		<u>(356.608.394,34)</u>
Arus kas dari aktivitas operasi		(16.306.370)
Arus kas bersih dari aktivitas operasi		
Arus kas dari aktivitas investasi	(11.059.500)	
Kenaikan peralatan usaha	<u>(1.950.000)</u>	
Kenaikan peralatan kantor		(13.009.500)
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(75.000)	
Arus kas dari aktivitas pendanaan	<u>21.259.2000</u>	
Penurunan simpanan pokok		
Kenaikan simpanan wajib		<u>21.184.2000</u>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		(8.131.670)
Penurunan kas		<u>149.259.770</u>
Kas diawal periode		141.128.1000
Kas per 31 desember 2008		

D. Penilaian Dan Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota.

Penyusunan laporan promosi ekonomi anggota memperlihatkan seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu periode akuntansi dengan memencatat selisih antara harga pelayanan atau penjualan oleh koperasi dengan harga pasar wajar setiap unit kegiatan koperasi.

Dalam laporan keuangannya KPRI "GKR" Rambah tidak menyajikan laporan promosi ekonomi anggota sebagai bagian dari laporan keuangan. Koperasi menganggap bahwa laporan promosi ekonomi anggota hanya merupakan laporan tambahan, sedangkan laporan yang utama menurut koperasi adalah neraca dan laporan perbandingan hasil usaha.

Karena koperasi tidak membuat laporan promosi ekonomi anggota maka tidak dapat diketahui seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh anggota selama satu tahun tertentu.

Menurut penulis berdasarkan PSAK No. 27 sebagaimana telah penulis uraikan kedalam bab telaah pustaka laporan promosi ekonomi anggota harus disajikan pada laporan keuangan koperasi, karena laporan promosi ekonomi anggota merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan.

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas berikut penulis sajikan contoh laporan promosi ekonomi anggota untuk KPRI "GKR" Rambah untuk tahun yang berakhir 2008 dan 2007. Harga pokok produksi untuk tahun 2008 sebesar Rp. 148.420.000 keuntungan yang ditetapkan oleh koperasi sebesar 8 persen per tahun dari harga pokok penjualan yaitu menjadi Rp 11.873.600, sedangkan dipasaran jika harga pokok produksi sebesar Rp 148.420.000 pasar mengambil keuntungan sebesar 16 persen

per tahun yaitu menjadi sebesar Rp.23.747.200 Dari selisih harga inilah manfaat ekonomi dari transaksi pengadaan barang untuk anggota tahun 2008 sebesar Rp. 1 1.873.600

Sedangkan untuk tahun 2007 harga pokok produksi dari koperasi sebesar Rp. 136.230.000, keuntungan yang ditelapkan oleh koperasi sebesar 8 persen per tahun yaitu sebesar Rp. 10898.400, sedangkan jika pasar dengan harga pokok produksi sebesar Rp. 136.230.000 pasar mengambil keuntungan 16 persen per tahun sebesar Rp. 21.796.800. Dari selisih harga inilah akan didapat manfaat ekonomi dari transaksi pengadaan barang untuk anggota tahun 2007 sebesar Rp.10.898.400.

Untuk manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi penulis mengambil contoh dari perhitungan sebagai berikut : pada tahun 2008 salah seorang anggota koperasi meminjam uang tunai dikoperasi sebesar Rp 25.000.000 selama satu tahun dengan suku bunga yang diberikan koperasi sebesar 14 persen per tahun, bunga yang harus dibayar oleh anggota koperasi tersebut sebesar Rp. 3.500.000. Sedangkan jika anggota meminjam di bank sebesar Rp 25.000.000 selama setahun dengan suku bunga yang diberikan bank sebesar 22 persen per tahun, maka bunganya sebesar Rp. 5.500.000, maka selisih beban bunga yang harus dibayar anggota kepada koperasi sebesar Rp. 2.000.000. Inilah yang menjadi beban penghematan pinjaman anggota untuk tahun 2008.

Dan pada tahun 2007 salah seorang anggota koperasi meminjam uang tunai dikoperasi sebesar Rp. 23.000.000 selama satu tahun dengan suku bunga yang diberikan koperasi sebesar 12 persen per tahun, oleh sebab itu bunga yang harus dibayar anggota koperasi sebesar Rp. 2.760.000. Sedangkan jika anggota meminjam di bank sebesar Rp. 23.000.000 selama setahun dengan suku bunga yang diberikan bank sebesar 20 persen per tahun, sehingga bunganya sebesar Rp 4.600.000, maka selisih beban bunga yang harus

dibayar anggota kepada koperasi sebesar Rp. 1.840.000. Inilah yang menjadi beban penghematan pinjaman anggota untuk tahun 2007.

Untuk kelebihan balas jasa simpan pinjam penulis membuat contoh sebagai berikut : pada tahun 2008 salah seorang anggota koperasi menyimpan uangnya dikoperasi sebesar Rp. 10.000.000 dengan bunga yang diberikan koperasi sebesar 16 persen per tahun, maka bunga yang diperoleh anggota sebesar Rp. 1.600.000, sedangkan jika anggota koperasi menyimpan di bank sebesar Rp. 10.000.000 dengan bunga yang diberikan bank sebesar 12 persen per tahun, sehingga bunganya sebesar Rp. 1.200.000. Jadi selisih antara bunga koperasi dengan bank yang diterima anggota koperasi sebesar Rp. 400.000, inilah yang menjadi kelebihan balas jasa simpanan anggota untuk tahun 2008.

Dan pada tahun 2007 salah seorang anggota koperasi menyimpan uangnya dikoperasi sebesar Rp. 8.000.000 dengan bunga yang diberikan koperasi sebesar 14 persen per tahun, maka bunga yang diperoleh anggota sebesar Rp. 1.120.000, sedangkan jika anggota koperasi menyimpan di bank sebesar Rp. 8.000.000 dengan bunga yang diberikan bank sebesar 10 persen per tahun, sehingga bunganya sebesar Rp. 800.000. Jadi selisih antara bunga koperasi dengan bank yang diterima anggota koperasi sebesar Rp. 320.000, inilah yang menjadi kelebihan balas jasa simpanan anggota untuk tahun 2007.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang laporan promosi ekonomi anggota, penulis mengusulkan cara penyajian laporan promosi ekonomi anggota yang berpedoman pada PSAK No. 27 tahun 2008 dan 2007 pada label IV. 4 berikut ini

Tabel IV.4
KPRI GURU-GURU KEEAMATAN RAMBAH
(KPRI “GKR”)

LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun Yan Berakhir 31 Desember 2008 Dan 2007

PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN	2008	2007
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA		
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	Rp. –	Rp. –
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar	(–)	(–)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi	Rp. –	Rp. –
Pemasamn Produk Anggota		
MANFAAT DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA		
Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Pasar	Rp. 23.747.200	Rp. 21.796.8000
Pengadaan Barang Atas Dasar Harga Koperasi	<u>Rp.(11.873.600)</u>	<u>RP.(10.898.400)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Dari Transaksi Pengadaan Barang Untuk Anggota	Rp. 11.873.600	Rp. 10.898.400
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI		
Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp. 2.000.000	
Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	<u>Rp. (400.000)</u>	Rp. 1.840.000
Jmunlah Promosi Ekonomi Dari transaksi Penyedia Jasa Untuk Anggota	Rp. 1.600.000	<u>Rp. (320.000)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota SelamaTahn Berjalan	Rp. 13.473.600	Rp. 1.520.000
PROMOSI EKONOMI PADA AKHIR TAHUN		
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan I Untuk Anggota.	Rp. 340.302.024,34	Rp. 12.418.400
		Rp. 79.360.789
Jumlah Promosi Ekonomi anggota	Rp. 353.775.624,34	Rp. 91.779.189

E. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sesuai dengan fungsinya memberikan informasi tambahan mengenai pos-pos neraca dan pos—pos perhitungan sisa hasil usaha, maka catatan atas laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu kebijakan akuntansi dan penjelasan unsur-unsur laporan keuangan.

Sedangkan catatan atas laporan keuangan KPRI "GKR" Rambah tidak menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi atas metode-metode yang digunakan untuk melaporkan unsur-unsur laporan keuangan. Sehingga pengguna laporan keuangan tidak dapat memahami dan mengetahui kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh koperasi dalam menjalankan aktivitas usaha dan penyusunan laporan keuangannya.

Berdasarkan PSAK No. 27 koperasi harus menyajikan catatan atas laporan keuangan yang menggambarkan dan menjelaskan kebijakan koperasi atas metode yang digunakan untuk menilai dan melaporkan unsur-unsur laporan keuangan. Disamping itu dalam catatan atas laporan keuangan juga menyajikan penjelasan mengenai unsur-unsur neraca dan laporan perhitungan hasil usaha.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari pengurus koperasi dan data yang diperoleh dari KPRI "GKR" Rambah (terlampir) penjelasan unsur-unsur neraca telah disajikan namun perkiraan mini market tidak diungkap. Sedangkan penjelasan perhitungan sisa hasil usaha dan kebijakan akuntansi untuk tahun 2008 belum disajikan, berikut penjelasan mengenai penyajian catatan atas laporan keuangan KPRI "GKR" Rambah:

I. Kebijakan Akuntansi.

a. Pengakuan Pendapatan dan Beban.

Pendapatan diakui berdasarkan asas akrual yaitu dikaitkan dengan pengurangan aktiva dan kewajiban serta perubahan-perubahan pada saat terjadinya, tidak hanya sekedar pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas.

b. Penyajian Laporan Keuangan.

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis.

c. Piutang.

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominalnya dan dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih.

d. Persediaan.

Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan yang ditentukan dengan metode *first in first out* (FIFO).

e. Aktiva tetap.

Aktiva tetap dinilai berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan aktiva tetap. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

2. Penjelasan unsur-unsur neraca.

a. Kas berupa uang tunai per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 141.128.100

b. Bank per 31 Desember 2008 sebesar Rp. 29.770.609,57

c. Piutang anggotanya sebesar Rp. 1.453.644.299 per 31 Desember 2008 terdiri atas piutang khusus sebesar Rp. 27.716.200, piutang simpan pinjam sebesar Rp. 1.099.482.087, piutang warisan sebesar Rp. 288.045.012, piutang lebaran sebesar Rp. 38.401.000.

- d. Penyisihan piutang sebesar Rp. 86.428.556 per 31 Desember 2008, terdiri atas penyisihan piutang simpan pinjam sebesar Rp. 51.418.484, penyisihan piutang waserda sebesar Rp. 27.502.442, dan penyisihau piutang tak tertagih sebesar Rp. 7,507.630
- e. Mini market sebesar Rp. 305.752.244,84 merupakan kekayaan mini market per 31 Desember 2008
- f. Pendapatan YMH diterima sebesar Rp. 78.957.055 per 31 Desember 2008.
- g. Penyenaan pada PKPN sebesar Rp. 753.700 per 31 Desember 2008 adalah saldo penyertaan pada PKPRI.
- h. Tanah sebesar Rp. 23.625.000 adalah nilai perelehan per 31 Desember 2008.
- i. Bangunan sebesar Rp. 261.850.000 adalah nilai perolehan per 31Desember 2008.
- j. Akum. Peny bangunan sebesar Rp. 57.845.000 adalah saldo akum. Penyusutan per 31 Desember 2008.
- k. Mesin sebesar Rp. 14.598.200 adalah nilai perolehan per 31 Desember 2008.
- l. Akum. Peny mesin sebesar Rp. 14.019.996 adalah saldo a.kum penyusutan per 31 Desember 2008.
- m. Peralatan usaha sebesar Rp.20.957.400 adalah nilai pereleben per 31 Desember 2008.
- n. Akum. Peny peralatan usaha sebesar Rp. 11.427.390 adalah saldo akum penyusutan per 31 Desember 2008.
- o. Peralatan kantor sebesar Rp. 23.586.300 adalah nilai perolehan per 31 Desember 2008.
- p. Akum peny peralatan kantor sebesar Rp 22.551.279 adalah saldo akum penyusutan per 31 Desember 2008.
- q. Biaya YMH dibayar sebesar Rp. 50.000.000 per 31 Desember 2008.

- r. Hutang dana-dana sebesar: Rp. 93.383.275 per 31 Desember 2008 merupakan hutang dana-dana yang terdiri atas dana pengurus sebesar Rp. 3.823.312, dana karyawan sebesar Rp. 5.258.306, dana pendidikan sebesar Rp. 37.164.097, dana sosial sebesar Rp. 12.724.073 dan dana PEMDAKER sebesar Rp. 34.413.487.
- s. Pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp. 24.494.727 per 31 Desember 2008. yang terdiri atas pendapatan yang ditangguhkan sebesar Rp.14.964.727 dan penambahan dari investaris mini market sebesar Rp 9.530.000.
- t. Dana resiko sebesar Rp. 50.263.000 per 31 Desember 2008.
- u. Hutang simpaun anggota sebesar Rp. 547.302.790,91 adalah hutang simpanan anggota per 31 Desember 2008 yang terdiri atas simpanan sukarela sebesar Rp. 517.065.461,91 dan SHU bagian anggota sebesar Rp.30.237.329.
- v. Dana PKPN sebesar Rp. 10.179.781 adalah saldo dana PKPN per 31 Desember 2008.
- w. Simpanan pokok sebesar Rp, 16.531.000 merupakan saldo simpanan pokok per 31 desember 2008.
- x. Simpanan wajib sebesar Rp. 226.900.785 merupakan saldo simpanan wajib per 31 Desember 2008.
- y. Donasi sebesar Rp. 500.000 merupakan saldo donasi per 31 Desember 2008.
- z. Cadangan sebesar Rp. 723.132.834 merupakan saldo eadangan per 31 Desember 2008.
- a. SHU tahun 2007 sebesar Rp. 79.360.470 merupakan saldo SHU tahun 2007 per 31 Desember 2008
- b. SHU mhun bexjalan sebesar Rp. 347.809.654,34 merupakan saldo SHU per 31 Desomber 2008.

3. Penjelasan Perhitungan Sisa Hasil Usaha.

- a. Panisipasi bruto anggota sebesar Rp. 124.173.250, merupakan saldo panisipasi bruto anggota per 31 Desember 2008 yang bersumber dari jasa simpan pinjam.
- b. Penjualan sebesar Rp. 187.690.750 merupakan saldo penjualau per 31 Desember 2008 yang berasal dari penjualan barangan waserda.
- e. Harga pokok sebesar Rp. 148.420.000 merupakan salde harga pokok per 31 Desember 2008.
- d. Beban usaha sebesar Rp. 30.890.000 merupakan saldo beban usaha per 31 Desember 2008 yang berasal dari beban gaji karyawan sebesar Rp.21.050.000, beban gaji kolektor sebesar Rp. 3.840.000, beban gaji petugas ADM sebesar Rp. 2.400.000 dan beban gaji KA unit SP sebesar Rp.3.600.00
- e. Beban administrasi dan umum sebwar Rp. merupakan saldo beban administmsi dan umum per 31 Desember 2008 yang berasal dari beban pengurus sebesar Rp.18.000.000, beban pemwatnn kantor sebesar Rp. 3.250.000, beban pemeliharaan inventaris sebesar Rp. 1.200.000, beban rapat sebesar Rp. 2.300.000, beban air,1isu-ik,telep0n sebesar Rp. 2.077.465, beban transportasi sebesar Rp. 1.750.000, beban konsumsi sebesar Rp. 2.200.000, beban pajak PBB sebesar Rp. 372.500, beban penyusutan inventaris sebesar Rp. 15.282.100, beban RAT sebesar Rp.18.767.000, beban ATK sebesar Rp. 3.267.170, beban kelaneamn usaha Rp. 900.000 dqbeban pembulaxan kas sebesar Rp. 24,91
- f. Pendapatan lain-lain sebesar Rp. 284.621.914,25 merupakan saldo pendapaman lain-lain per 31 Desember 2008 yang berasal dari SHU SWamitra 2006 s/d 2008 sebesar Rp.

69.957.054,84, fee dari mini market sebesar Rp. 200.167.276,84, bunga rekening tabungan sebesar Rp 1.497.582,57 dan sewa toko sebesar Rp 13.000.000

g. SHU tahun berjalan setelah pajak sebesar Rp. 347.809.654,34

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Penyajian laporn keuangan KPRI "GKR"Rambah telah memuat penilaian dan penyajian sesuai dengan PSAK pada unsur-unsur laporan keuangan.
2. Penilaian Kas dan Bank berdasarkan nilai yang tercantum pada Kas dan Bank, penyajian pada bagian atas dari aktiva lancar sebagai aktiva yang paling likuid.
3. Pada tahun 2008 KPRI "GKR"Rambah tidak melakukan penyisihan piutang tak tertagih, hal ini dapat dilihat pada laporan Neraca KPRI "GKR"Rambah tahun 2008, oleh sebab itu beban disajikan terlalu rendah dan SHU disajikan terlalu tinggi.
4. pada saat penyusunan Neraca KPRI "GKR"Rambah tahun 2008, penempatan nama perkiraan untuk Akumulasi Penyusutan pada Aktiva Tetap disajikan terpisah dengan nilai netto nya.
5. KPRI "GKR"Rambah belum menggabungkan perkiraan untuk kewajiban kepada anggota menjadi satu perkiraan yaitu Hutang Simpanan Anggota.
6. Dalam penyajian pendapatan KPRI "GKR"Rambah tidak memisahkan antara pendapatan yang berasal dari anggota dan pendapatan yang berasal dari non anggota. Hal ini terjadi karena koperasi tidak memisahkan tempat penjualan kepada anggota dan non anggota, ketidak ada pemisahan ini menyebabkan besarnya partisipasi anggota dalam memajukan koperasi dan kepentingan koperasi dalam melayani anggotanya tidak dapat terlihat jelas.
7. Dari unsur-unsur laporan keuangan yang harus disajikan menurut PSAK No. 27, KPRI "GKR"Rambah hanya menyajikan Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha,

sedangkan laporan Arus Kas, laporan promosi ekonomi anggota dan Laporan arus laporan keuangan tentang kebijakan Akuntansi dan penjelasan Perhitungan Hasil Usaha belum disajikan oleh KPRI "GKR"Rambah.

B. SARAN

1. KPRI "GKR"Rambah harus konsisten dalam membuat penyisihan untuk piutang tak tertagih sehingga piutang dilaporkan sebesar nilai yang diharapkan dapat diterima atau ditagih.
2. Dalam penyajian Perhitungan Hasil Usaha sebaiknya KPRI "GKR"Rambah memisahkan antara pendapatan yang berasal dari anggota dan pendapatan yang berasal dari non anggota.
3. KPRI "GKR"Rambah seharusnya membuat laporan Arus Kas untuk menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajibannya dan menilai kemampuan koperasi dalam menghasilkan Kas dan setoran Kas.
4. KPRI "GKR"Rambah seharusnya membuat laporan promosi ekonomi anggota dalam laporan keuangannya. Laporan ini sangat penting agar dapat melihat seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima anggota KPRI "GKR"Rambah. Di sisi lain laporan promosi ekonomi anggota salah satu unsur dari laporan keuangan koperasi di Indonesia seperti yang dinyatakan dalam PSAK No. 27.
5. Untuk menghasilkan laporan Keuangan yang dapat memberikan informasi yang handal, sebaiknya koperasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan dan pendidikan perkopewasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'a.n Surat Al-Maidah ayat 2, Hadist oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Annas bin Malik RA
- Anaroga, Panji, Nanik Widiyanti, 2003, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, edisi Pertama, Pustaka Jaya, Semarang.
- Harahap, Sofian Syafi'i, 2000, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2001, *Teori Akuntansi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hendrojogi, 2002, *Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hudiyanto, 2002, *Sistem Koperasi Ideologi dan Pengelolaan*, Penerbit UII Pers, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 2004,
- _____, 2004 *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- _____, 2007, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba empat, Jakarta
- Kieso, Donald E, Jefri J Weaygandt, 2002, *Akuntansi Intermediate*. Edisi Ketujuh, jilid 1, Alih bahasa, Herman Wibowo, Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Kusnadi H, 1999, *Akuntansi Keuangan*, Edisi Pertama, Universitas Brawijaya, Malang.
- Mardiasmo, 2000, *Akuntansi Keuangan Dasar*, Fakultas Ekonomi universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Niswonger, E. Rollin, Philip E, Fess dan Eall S. Wareen, 1999, *Prinsip-prinsip Akuntansi. Edisi Kesembilan Belas*, Jilid 1, Penerjemah Alfonsus Sirait, Helda Gunawan, Erlangga, Jakarta.
- Riva'I, Wirasasmita, Ani Kenangasari, 1999, *Analisis Laporan Keuangan Koperasi*, Edisi Pertama, Pioneer Jaya, Bandung.
- Sadeli, Lili, 2006, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Cetakan Ketiga, Penerbit FAKSARA, Jakarta.

- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktek*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sutinsih, 2008. *Analisis Penerapan PSAK No 27 pada koperasi Unit Desa (KUD) Lestari Jaya Kampar*, Fekonsep UIN Suska Riau.
- Sutojo, Siswanto, 2000, *Mengenal Arri dan Penggunaan Neraca Perusahaan*, PT Damar Milia Pusaka, Jakarta.
- Soemarse, SR, 1999, *Akuntansi suatu pengantar*, Edisi Keempat, PT Rimeka Cipta, Jakarta.
- Pemerintah RI, *Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Lembaga Negara RI, Jakarta.

DAFTAR TABEL

Tabel

II.1	Contoh Neraca Yang Disusun berdasarkan PSAK No. 27.....	34
II.2	Contoh Perhitungan Hasil Usaha yang disusun berdasarkan PSAK No. 27.....	38
II.3	Contoh Laporan Arus Kas Metode langsung yang disusun Berdasarkan PSAK No.27.....	41
II.4	Contoh Laporan Arus Kas Metode Tidak Langsung yang disusun berdasarkan PSAK No.27.....	42
II.5	Contoh Laporan Promosi ekonomi Anggota yang disusun berdasarkan PSAK No.27.....	44
IV.1	Laporan Neraca Yang Disusun berdasarkan PSAK No.27.....	63
IV.2	Laporan perhitungan Hasil Usaha yang disusun Berdasarkan PSAK No.27.....	69
IV.3	Laporan Arus Kas yang disusun berdasarkan PSAK No.27.....	71
IV.4	Laporan Promisi Ekonomi Anggota yang disusun Berdasarkan PSAK No.27.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar

III.1	Struktur Organisasi KPRI"GKR" Rambah.....	52
-------	---	----